

**PERAN STRATEGIS PEMUDA DALAM MENDORONG TATA KELOLA
PARIWISATA BERKELANJUTAN:
Sebuah Studi Partisipasi Publik dalam Perspektif Administrasi Publik**

(Skripsi)

Oleh

**SOLTHAN NUR ARIFIN
NPM 1946041009**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERAN STRATEGIS PEMUDA DALAM MENDORONG TATA KELOLA PARIWISATA BERKELANJUTAN: Sebuah Studi Partisipasi Publik dalam Perspektif Administrasi Publik

Oleh

SOLTHAN NUR ARIFIN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran strategis pemuda dalam mendorong tata kelola pariwisata berkelanjutan di Indonesia, dengan fokus pada perspektif administrasi publik dan partisipasi publik. Pemuda, sebagai agen perubahan, memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya pariwisata, namun sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui pendekatan kualitatif dan metode scoping review, penelitian ini mengidentifikasi bentuk dan tingkat partisipasi pemuda dalam tata kelola pariwisata, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keterlibatan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemuda dapat dibedakan menjadi tiga kategori: partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pariwisata. Faktor pendukung seperti dukungan kebijakan pemerintah, akses terhadap informasi, dan keberadaan organisasi pemuda yang aktif berperan penting dalam meningkatkan partisipasi. Sebaliknya, hambatan seperti kurangnya dukungan, stigma budaya, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya dapat mengurangi motivasi pemuda untuk terlibat. Strategi yang direkomendasikan untuk memperkuat peran pemuda mencakup pengembangan program pendidikan dan pelatihan yang relevan, penguatan organisasi pemuda sebagai platform kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi dan media sosial untuk promosi pariwisata. Dengan melibatkan pemuda secara aktif dalam pengambilan keputusan dan memberikan akses terhadap sumber daya, diharapkan dapat mendorong keterlibatan mereka dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal.

Kata Kunci: Peran Strategis, Pemuda, Pariwisata Berkelanjutan, Partisipasi Publik

ABSTRACT

THE STRATEGIC ROLE OF YOUTH IN PROMOTING SUSTAINABLE TOURISM GOVERNANCE: A Research of Public Participation from a Public Administration Perspective

By

SOLTHAN NUR ARIFIN

This research aims to explore the strategic role of youth in promoting sustainable tourism governance in Indonesia, focusing on the perspectives of public administration and public participation. Youth, as agents of change, have significant potential to contribute to the management of tourism resources; however, they are often marginalized in the decision-making process. Through a qualitative approach and scoping review method, this research identifies the forms and levels of youth participation in tourism governance, as well as the factors that support and hinder their involvement. The findings indicate that youth participation can be categorized into three areas: participation in planning, implementation, and evaluation of tourism programs. Supporting factors such as government policy support, access to information, and the presence of active youth organizations play a crucial role in enhancing participation. Conversely, barriers such as lack of support, cultural stigma, and limited access to resources can diminish youth motivation to engage. Recommended strategies to strengthen the role of youth include the development of relevant educational and training programs, strengthening youth organizations as collaborative platforms, and utilizing technology and social media for tourism promotion. By actively involving youth in decision-making processes and providing access to resources, it is expected that their engagement in sustainable and inclusive tourism management will be encouraged, resulting in positive impacts for local communities.

Keywords : Strategic Role, Youth, Sustainable Tourism, Public Participation.

**PERAN STRATEGIS PEMUDA DALAM MENDORONG TATA KELOLA
PARIWISATA BERKELANJUTAN:
Sebuah Studi Partisipasi Publik dalam Perspektif Administrasi Publik**

Oleh

SOLTHAN NUR ARIFIN

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA
ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

JUDUL SKRIPSI

**: PERAN STRATEGIS PEMUDA DALAM
MENDORONG TATA KELOLA
PARIWISATA BERKELANJUTAN: Sebuah
Studi Partisipasi Publik dalam Perspektif
Administrasi Publik**

Nama Mahasiswa

: Solthan Nur Arifin

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1946041009

Program Studi

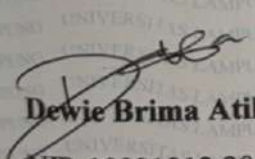
: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

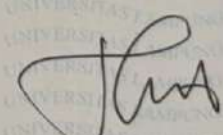
: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

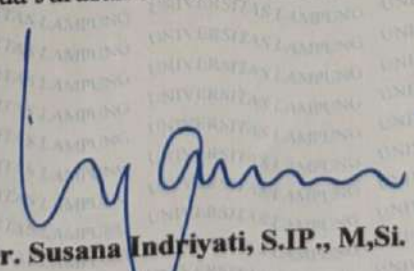

Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.

NIP. 19821212 200801 2 017


Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si.

NIP. 19910924 201903 2 019

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Susana Indriyati, S.IP., M.Si.

NIP. 19700914 200604 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.

Sekretaris : Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si.

Penguji : Dr. Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 November 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 11 November 2025
Yang membuat pernyataan,



Solthan Nur Arifin
NPM. 1946041009

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Solthan Nur Arifin, dilahirkan di Kota Metro, Provinsi Lampung pada tanggal 08 Agustus 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Lukman Nul Hakim Saleh dan Ibu Yuliawati. Penulis berkebangsaan Indonesia, bersuku Palembang, dan beragama Islam.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 5 Metro Pusat yang diselesaikan pada tahun 2013, dilanjutkan di SMPN 9 Metro yang diselesaikan pada tahun 2016, dan SMAN 5 Metro yang diselesaikan pada tahun 2019.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2019 melalui jalur Mandiri Pararel. Selama perjalanan menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis tergabung sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (Himagara). Penulis terlibat dalam kegiatan magang di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan pernah ditugaskan menjadi panitia pelaksanaan kegiatan Muli Mekhanai Provinsi Lampung pada tahun 2023 selama enam bulan. Selain itu, penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2022 di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro selama 40 hari.

MOTTO

“Jangan bilang tidak mungkin kepadaku sebelum kamu mati dalam mencobanya..”

(Sultan Muhammad Al-Fatih)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, karya ini dipersembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku Ibu dan Ayah, serta Adiku

Terima kasih untuk cinta, doa, dan dukungan yang tanpa batas. Engkau adalah alasan sampai sekarang diri ini masih semangat untuk terus bertumbuh dan berkembang. Skripsi ini bentuk terima kasih kecil dan simbol rasa bangga untuk dukungan dan doa engkau yang jauh disana yang juga dang berjuang untuk menyelesaikan apa yang kau mulai.

Diriku Sendiri

Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah menyelesaikan studi dan skripsi ini. Skripsi ini piala kebanggaanmu yang telah berhasil menjadi seorang sarjana.

Seluruh Dosen Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Terima kasih atas semua ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama berkuliah sebagai bekal menghadapi dunia luar.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas limpahan berkat rahmat dan hidayat yang diberikan oleh Allah SWT serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Strategis Pemuda dalam Mendorong Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan: Sebuah Studi Partisipasi Publik dalam Perspektif Administrasi Publik”** guna mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dorongan, saran, motivasi, dan dukungan dari banyak orang telah memberikan inspirasi selama masa perkuliahan dan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah, kekuatan, nikmat sehat jasmani dan rohani, serta telah membekali ilmu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Teristimewa, kedua orang tua (Ibu Yuliawati dan Ayah Lukman Nul Hakim Saleh) yang telah memberikan segenap cinta, doa, dan dukungannya.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S. IP., M. Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, serta selaku Dosen pembimbing utama yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, kebaikan, dan bimbingannya yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini sampai selesai dan dan

menjadi lebih baik.

6. Ibu Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing Kedua sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas dorongan, ilmu, waktu, dan bimbingannya yang sangat membantu dalam menyelesaikan studi terutama skripsi ini.
7. Ibu Dr. Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penguji penulis. Terima kasih atas saran dan kritik yang membangun, serta bimbingan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama berkuliah.
9. Seluruh staf dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menempuh studi selama masa perkuliahan.
10. Ayah kesayangan penulis, Lukman Nul Hakim Saleh yang tak pernah letih untuk selalu mengingatkan, bahwa selesaikan apa yang kamu mulai dan kejar apa yang kamu inginkan. Ibu kesayangan penulis, Yuliawati yang tak pernah letih untuk berucap dan bertindak dalam menyemangati dalam menyelesaikan kuliah penulis.
11. Solthan Aziz Al Hakim adik kesayangan penulis yang selalu bisa membuat penulis kembali tertawa, adik penulis yang sedang berjuang jauh di kota orang untuk masa depannya. “Adik, semoga secepatnya menjadi dokter hewan yang adik cita-citakan”. Abangmu, abang Arif
12. Teman penulis sedari SMA, Almer, Diki, Dimas Heru, Dimas Adi, Obin, Dinda, Lenceng, Yoga, Yogi, Zaki, David, dan Hanpin. Terima kasih telah selalu bilang untuk menyelesaikan skripsi penulis selama ini, meyakinkan penulis kalau penulis pasti bisa dan akan selalu bisa, memberikan semangat lewat hal-hal unik dan lucu, dan terpenting paling mengerti penulis..

13. Teman-teman tersayang sejak mulai berkuliah, Aditya Irawansyah. Terima kasih sudah bersedia menjadi teman dekat penulis dan kebersamaan penulis menikmati masa-masa berkuliah di kampus. Jangan malas menyelesaikan skripsinya, karena kita mulai bertiga dan harus selesai bertiga juga.
14. Shella Ayu Nur Jannah yang akrab penulis panggil Lala. Terima kasih atas semangatnya yang selalu menyemangati untuk mengejar gelar sarjana dari awal semenjak kita bersama. Juga waktu dan tenaga Lala dalam membantu penulis mengerjakan skripsi ini kapan pun dan di mana pun. Terima kasih sudah selalu mendorong penulis untuk mengerjakan revisi dan pergi bimbingan.
15. Teman-teman Granada yang selalu ramah menyapa dan menyempatkan hadir pada setiap momen penting penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah meramaikan dan menyempatkan hadir di seminar proposal, seminar hasil, dan sidang skripsi penulis.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi yang berguna bagi pembaca yang berminat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan di kemudian hari.

Bandar Lampung, 18 November 2025
Penulis

Solthan Nur Arifin

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Batasan Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Administrasi Publik dan Tata Kelola Pembangunan Daerah	11
2.2. Partisipasi Publik dalam Perspektif Administrasi Publik	15
2.3. Peran Pemuda Dalam Pembangunan.....	20
2.4. Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan	25
2.5. Teori Empowerment dalam Administrasi Publik.....	31
2.6. Kerangka Berpikir.....	34
III. METODE PENELITIAN	36
3.1. Desain Penelitian	36
3.2. Kriteria Kelayakan (<i>Eligibility Criteria</i>).....	37
3.3. Identifikasi Sumber Literatur yang Relevan atau Sejenis	39
3.3.1. Sumber <i>Literature</i>	39
3.3.2. Strategi Pencarian	40
3.4. Seleksi Literatur	42
3.5. Proses Pengumpulan Data	44
3.6. Sintesis	45
3.7. Konsultasi.....	47

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1. Hasil	48
4.1.1. Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas.....	48
4.1.2. Ekstraksi Data	50
4.1.3. <i>Mapping/Scoping</i>	51
4.2. Pembahasan	55
4.2.1. Bentuk dan Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Tata Kelola Pariwisata	55
4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat	62
4.2.3. Strategi Peningkatan Peran Pemuda	66
V. PENUTUP	80
5.1. Kesimpulan.....	80
5.2. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. <i>Framework SALSA</i>	42
2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi	43
3. Ringkasan Seleksi Literatur	44
4. Komponen Penilaian Kualitas Metodologi	45
5. Prisma Flowchart	49
6. Karakteristik Umum	51
7. Tabel Tematik	53
8. Tingkat Partisipasi Pemuda	58
9. Faktor Penghambat dan Pendukung	63
10. Strategi Peningkatan Pemuda	66
11. Penerapan Prinsip Empowerment	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	34
2. Proses Pencarian Literatur Pada Aplikasi Publish or Perish (PoP)	41
3. Diagram Persebaran Jumlah Artikel Hasil <i>Charting</i> Data Berdasarkan Pembahasan Penerapan Masing-masing Prinsip Empowerment	49

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata kini menjadi sektor unggulan dalam pembangunan daerah, tidak hanya sebagai motor penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, serta penguatan identitas masyarakat. Seiring dengan meningkatnya fokus global terhadap pembangunan berkelanjutan, muncul kebutuhan akan tata kelola pariwisata yang tidak hanya adaptif dan efisien, tetapi juga mengedepankan prinsip inklusivitas dan partisipasi aktif. Dalam konteks ini, keterlibatan generasi muda menjadi aspek yang krusial untuk ditelaah secara lebih mendalam.

Sebagai kelompok sosial dengan energi besar, pemuda memiliki potensi signifikan dalam mendorong perubahan melalui kreativitas, pemanfaatan teknologi digital, dan semangat inovatif. Namun kenyataannya, peran pemuda dalam tata kelola pariwisata kerap terpinggirkan, terbatas pada peran teknis atau hanya sebagai target program, bukan sebagai aktor kunci dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan pembangunan wisata berkelanjutan.

Secara konseptual, pemuda merupakan kelompok usia yang berada dalam fase transisi antara masa remaja dan dewasa, yang memiliki potensi besar dalam pembentukan arah pembangunan bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia antara 16 sampai 30 tahun yang memiliki karakter moral, tanggung jawab sosial, serta semangat kebangsaan dan kepekaan terhadap perubahan sosial. Dalam konteks pembangunan, pemuda dipandang sebagai agen perubahan (*agent of change*), agen pembangunan (*agent of development*), dan agen pembaharu (*agent of renewal*) yang memiliki kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, serta mendorong inovasi di berbagai sektor, termasuk pariwisata.

Menurut Hurlock (2004), masa pemuda merupakan periode penting dalam

perkembangan individu karena pada masa ini seseorang memiliki energi tinggi, kreativitas, serta kemampuan belajar dan menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial yang cepat. Pemuda juga dianggap sebagai kelompok yang paling adaptif terhadap teknologi, komunikasi, dan dinamika global, yang menjadikannya sangat relevan dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di era modern.

Dengan karakteristik tersebut, keberadaan pemuda dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan menjadi penting karena mereka memiliki potensi untuk menghadirkan ide-ide baru, memperkenalkan inovasi digital, serta berperan aktif dalam pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Oleh karena itu, partisipasi pemuda tidak hanya dipandang sebagai dukungan teknis, tetapi juga sebagai bentuk keterlibatan strategis dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang administrasi publik, peran serta pemuda merupakan bagian dari mekanisme partisipasi publik yang mendukung praktik tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*), meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong munculnya inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Melalui pendekatan partisipatif ini, studi ini akan mengeksplorasi bagaimana pemuda dapat diberdayakan secara substansial dalam siklus kebijakan—mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi—guna mewujudkan tata kelola pariwisata yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemuda merupakan aktor utama dalam setiap peristiwa penting yang terjadi di Indonesia dan setiap hal yang menyangkut perubahan selalu dilekatkan pada diri pemuda. Peran pemuda sangat penting dalam kemajuan bangsa, tonggak maju tidaknya suatu bangsa terletak di tangan para pemuda. Pemuda pada masa lampau mempunyai peran dan tugas yang cukup berat, tidak hanya merintis dan menegakkan kemerdekaan, tetapi juga harus mempertahankannya. Pemuda merupakan aset bangsa yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Kemajuan atau kehancuran bangsa dan negara banyak tergantung pada kaum mudanya sebagai *agent of change* (agen perubahan). Pada setiap perkembangan dan pergantian peradaban selalu ada darah muda yang memeloporinya.

Pada masa sekarang maupun yang akan datang, generasi muda harus mampu mengisi kemerdekaan dengan pembangunan dalam segala aspeknya. Untuk itu, generasi muda harus bekerja lebih keras lagi, khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab, dengan penguasaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang benar, generasi muda akan mampu berperan secara aktif dalam memecahkan masalah-masalah yang timbul di masyarakat.

Peranan pemuda dalam bersosialisasi dengan masyarakat saat ini sudah menurun drastis, pemuda sudah jarang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di dunyanya, baik dalam perkumpulan pemuda, acara-acara keagamaan, maupun acara-acara kemasyarakatan lainnya. Pemuda lebih suka dengan kesenangan dunianya sendiri dan selalu bermain-main, lebih suka peranan di dunia maya daripada di dunia nyata seperti bermain di media sosial, yaitu *facebook*, *instagram*, dan *twitter* daripada duduk mufakat untuk kemajuan RT, RW, Kecamatan, Provinsi bahkan di tingkat yang lebih tinggi yaitu Negara.

Menurut Rachman (2011) dalam *journal of non formal education* dengan judul Keefektifan Manajemen Pendidikan Karakter Pilar Konservasi Budaya Melalui Strategi Pembelajaran Inkuiri Sosial Bagi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang Kehidupan (2015), mengatakan bahwa : “di era globalisasi membutuhkan generasi muda masa depan yang memiliki tiga karakteristik menurut: (a) berilmu atau *knowledge society*; (b) berbudaya atau *cultured society*; (c) dan beradab atau *civilized society* (Suyanto, 2011). Berdasarkan pendapat dari Edward dan Rachman, dapat diketahui bahwa pemuda menjadi tonggak utama atau pilar utama dalam konservasi budaya di Indonesia.

Era *millennial* atau usia yang lebih muda sangat diidentikkan dengan era *society* 5.0. Dimana dengan *General Public* 5.0, masyarakat dididik untuk memiliki pilihan untuk menggabungkan kehidupan antara dunia maya dan realitas masa kini dengan baik, sehingga akan berdampak positif dan selaras dengan hakikat keberadaan manusia. (Rezky et all., 2019). Di mata publik 5.0, nilai baru yang diciptakan melalui kemajuan inovatif dapat membatasi penyimpangan manusia dan masalah moneter di kemudian hari. *Society* 5.0 Dalam istilah dasar, ia

cenderung diuraikan sebagai gagasan masyarakat yang berfokus pada manusia dan berbasis inovasi (Mardiya, 2019). Peran kaum muda dalam pengembangan pariwisata sangat penting karena remaja sebenarnya sebagai klien atau bahkan *trendsetter* di bidang ini mungkin dapat mendukung kecepatan peningkatan kemajuan industri travel. melalui minat mereka secara lokal. Usia muda dengan segala manfaatnya diandalkan untuk menjadi penghubung antara sosial industri perjalanan dan peningkatan inovasi di masa masyarakat 5.0, seiring kemajuan sosial kemajuan industri perjalanan. Dipercaya bahwa batas yang digerakkan oleh usia yang lebih muda dapat membuat hubungan yang bersahabat antara penghuni terdekat dan pelancong.

Partisipasi seluruh elemen masyarakat termasuk masyarakat lokal dalam pelibatan pengembangan pariwisata adalah penting adanya. Hal ini tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional Tahun 2010- 2025, yang menyebutkan “Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.” Pemuda sebagai bagian dari masyarakat lokal pastinya juga harus diikutsertakan dalam pengembangan pariwisata.

Dalam konteks tata kelola pariwisata berkelanjutan, terdapat kesenjangan antara idealitas partisipasi pemuda yang diharapkan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Secara konseptual, pemuda seharusnya terlibat penuh dalam seluruh tahapan tata kelola mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dengan peran strategis sebagai mitra pemerintah dan masyarakat. Namun kenyataannya, tingkat partisipasi pemuda masih timpang: relatif tinggi pada tahap pelaksanaan, tetapi rendah pada perencanaan dan evaluasi. Pemuda lebih sering diposisikan sebagai pelaksana teknis, seperti panitia kegiatan atau promotor media sosial, bukan sebagai pengambil keputusan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap sumber daya, minimnya dukungan kebijakan berkelanjutan, dan masih adanya stigma budaya semakin memperlebar jarak antara konsep ideal partisipasi publik dengan realitas di lapangan. Kesenjangan inilah yang menjadikan penelitian

tentang strategi pemberdayaan pemuda dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan penting untuk dilakukan. Menurut laporan UNWTO (2022), keterlibatan pemuda dalam pariwisata berkelanjutan menurun pasca pandemi. Banyak program *community based tourism* yang sebelumnya digerakkan oleh pemuda. Menurut Kemenparekraf (2022) melaporkan banyak desa wisata berbasis ekowisata yang mengalami penurunan aktivitas, di mana kelompok pemuda (karang taruna/komunitas lokal) berkurang kontribusinya hingga 30–40% dibanding sebelum pandemi. Contohnya terdapat di Taman Nasional Komodo, NTT, di mana pemuda awalnya menjadi penggerak utama, namun pasca pandemi keterlibatan menurun karena banyak yang beralih kerja ke sektor lain. Pemuda lokal berperan sebagai pemandu ekowisata sekaligus penjaga konservasi satwa. Penelitian menunjukkan banyak pemuda memilih pekerjaan alternatif seperti ojek wisata atau migrasi keluar daerah karena tidak puas dengan pembagian keuntungan dan minimnya akses ke pelatihan resmi (Nugroho dkk., 2022). Pemuda diharapkan menjadi promotor budaya batak dan penjaga kelestarian lingkungan danau. Studi lapangan di Danau Toba menunjukkan hanya sedikit pemuda yang bertahan di komunitas wisata berkelanjutan; banyak yang memilih merantau karena menganggap pengelolaan pariwisata kurang menjanjikan secara ekonomi (Tri dkk., 2021). Menurut data UNWTO satu dari setiap tujuh orang penduduk dunia melakukan aktivitas wisata ke luar batas negara asalnya. Berkorelasi dengan meningkatnya arus wisata global, kawasan ASEAN memiliki tingkat pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara tertinggi di dunia (Damanik, 2018). Kondisi ini diproyeksi akan meningkat 10,3 persen pada tahun 2030 (UNWTO dalam Dirjen Kerjasama ASEAN Kemenlu., 2018). Seirama dengan kondisi ASEAN, jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 17,9% dibanding tahun sebelumnya (Kemenpar dalam Kedaulatan Rakyat, 2020). Alasan kunjungan wisatawan ke Indonesia ini disinyalir karena daya tarik keragaman potensi alam dan budayanya. Kondisi demikian merupakan bukti bahwa budaya yang unik merupakan magnet wisata yang kuat. Kontradiksi dengan kondisi di atas, prospek meningkatnya arus pariwisata merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Industri pariwisata budaya sangat rentan menyebabkan perubahan tatanan dan gaya hidup masyarakat. Pariwisata

diistilahkan sebagai agen perubahan budaya (*an agent of cultural change*) yang mempengaruhi perjalanan orang, adat istiadat, upacara keagamaan serta cara berpikir masyarakat (Yoeti dkk., 2017). Untuk itu, jika meningkatnya gelombang wisata tidak sinergis dengan perencanaan pariwisata yang matang, dikhawatirkan berdampak reaktif secara negatif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks ini, kontribusi sumber daya manusia lokal terutama pemuda merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk menunjang terlaksananya pengelolaan pariwisata yang mengutamakan pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut secara simultan diharapkan mampu memberi efek domino terhadap berbagai aspek termasuk dalam mengurangi dampak negatif pariwisata.

Analisis konsep pemuda dalam penelitian memandang pemuda sebagai sumber daya potensial dan generasi penerus yang menjadi aktor kunci perubahan di masyarakat. Merujuk pada undang-undang No. 40 tahun 2009

(11) Tentang Kepemudaan, pemuda merupakan warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Bahwa kegiatan pemberdayaan pemuda harus mengarah pada peningkatan keterampilan, pembimbingan dan berbagi (*sharing*) pengalaman dari pihak profesional (Dhanani, 2009). Terciptanya tanggung jawab, kewenangan dan hak pemuda di masyarakat secara lebih spesifik terbentuk melalui partisipasi pemuda dalam setiap upaya perubahan dan pembangunan masyarakat.

Hasil penelitian Partisipasi Pemuda dalam Pengembangan Desa Wisata, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor wisata tumbuh berkembang dari tahun ke tahunnya, dibuktikan dengan pengunjung wisata yang mengalami peningkatan (Nur Jannah, 2016). Keberhasilan tersebut tidak dapat dicapai dengan cara instan, melainkan dengan usaha yang keras untuk mengembangkan Desa Wisata. Salah satu kunci keberhasilannya yaitu melibatkan seluruh masyarakat, dari tokoh masyarakat, pengelola Desa Wisata, sampai pemuda dalam mengelolanya. Dalam struktur kepengurusan, Desa Wisata Brayut lebih melibatkan pemuda dalam mengelola desa wisata.

Pariwisata telah menjadi sektor strategis dalam pembangunan daerah, berfungsi tidak hanya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga sebagai instrumen pelestarian budaya, lingkungan, dan penguatan identitas komunitas. Dalam konteks global yang semakin mengedepankan pembangunan berkelanjutan, terdapat tuntutan untuk menerapkan tata kelola pariwisata yang tidak hanya efisien dan adaptif, tetapi juga partisipatif dan inklusif. Hal ini menjadi semakin penting mengingat pariwisata dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat lokal, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, keterlibatan pemuda dalam tata kelola pariwisata menjadi aspek yang mendesak untuk dikaji secara mendalam, mengingat mereka adalah generasi yang akan mewarisi dan mengelola sumber daya pariwisata di masa depan.

Pemuda merupakan kelompok sosial yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan, khususnya melalui kreativitas, inovasi digital, dan semangat transformasi sosial. Mereka memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan menawarkan solusi baru yang dapat meningkatkan daya tarik pariwisata. Namun, dalam banyak kasus, peran pemuda dalam tata kelola sektor pariwisata masih berada di posisi perifer. Pemuda sering kali hanya dianggap sebagai pelaksana teknis atau sasaran program, bukan sebagai agen strategis dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan wisata yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki pemuda dan pengakuan terhadap peran mereka dalam pengelolaan pariwisata.

Dalam perspektif ilmu administrasi publik, keterlibatan pemuda dapat dilihat sebagai bagian dari partisipasi publik yang berkontribusi terhadap tata kelola kolaboratif, penguatan akuntabilitas, serta penciptaan inovasi dalam layanan publik. Partisipasi pemuda dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan legitimasi kebijakan yang dihasilkan, karena mereka dapat memberikan perspektif yang berbeda dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui kerangka partisipasi publik, studi ini menyoroti bagaimana pemuda dapat dilibatkan secara bermakna dalam siklus kebijakan mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi untuk mewujudkan pariwisata yang inklusif, adil,

dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemuda tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Studi ini menjadi relevan dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola sektor pariwisata secara mandiri. Dalam kerangka ini, pemuda dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, membantu menyampaikan aspirasi dan kebutuhan komunitas lokal. Memahami dinamika partisipasi pemuda dalam tata kelola pariwisata menjadi penting untuk merancang kebijakan yang lebih responsif dan berbasis komunitas. Keterlibatan pemuda juga mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang terbuka dan kolaboratif, di mana suara dan kontribusi masyarakat, terutama pemuda, diakui dan dihargai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji lebih dalam peran strategis pemuda dalam mendorong tata kelola pariwisata berkelanjutan dengan menggunakan perspektif ilmu administrasi publik, khususnya dalam kerangka partisipasi publik dan tata kelola kolaboratif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana pemuda dapat diintegrasikan secara efektif dalam proses pengelolaan pariwisata, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, praktisi pariwisata, dan organisasi pemuda dalam merumuskan strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penting untuk menekankan bahwa keterlibatan pemuda dalam tata kelola pariwisata bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan investasi untuk masa depan. Dengan memberdayakan pemuda, kita tidak hanya menciptakan generasi yang lebih siap dalam mengelola pariwisata, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih *resilient* dan berdaya saing. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemuda harus terus didorong untuk menciptakan pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa bisa ditarik kesimpulan bahwa pemuda memiliki kekuatan yang besar untuk turut andil dalam pembangunan, tetapi apakah pemuda pada sekarang sadar bahwa pembangunan memerlukan keterlibatan pemuda. Oleh sebab itu, pembangunan dirasa memerlukan keterlibatan pemuda dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Selain sebagai penerus bangsa, namun pemuda juga mempunyai jiwa yang kuat dan semangat untuk pola pikir yang lebih maju. Untuk itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Peran Strategis Pemuda dalam Mendorong Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan: Sebuah Studi Partisipasi Publik dalam Perspektif Administrasi Publik”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi pemuda dalam tata kelola pariwisata di daerah ?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat keterlibatan pemuda dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan?
3. Bagaimana strategi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat peran pemuda dalam tata kelola pariwisata melalui pendekatan partisipatif?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk dan peran partisipasi pemuda dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keterlibatan pemuda dalam sektor pariwisata.
3. Untuk menganalisis strategi-strategi yang telah dikembangkan dalam penelitian terdahulu dalam rangka memperkuat peran pemuda dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan, tanpa merumuskan strategi baru.

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam isu partisipasi pemuda, tata kelola kolaboratif, dan inovasi dalam pelayanan publik sektor pariwisata.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini memberikan panduan bagi pemerintah untuk melibatkan pemuda secara efektif dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan, sekaligus memberikan strategi bagi organisasi pemuda untuk meningkatkan perannya sebagai co-creator kebijakan dan layanan pariwisata. Selain itu, penelitian ini menunjukkan peluang bagi industri pariwisata untuk berkolaborasi dengan pemuda dalam inovasi layanan dan promosi, menjadi referensi empiris bagi akademisi tentang partisipasi pemuda, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran pemuda dalam menjaga keberlanjutan pariwisata.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada keterlibatan pemuda dalam tata kelola pariwisata di wilayah Indonesia (akan ditentukan berdasarkan konteks lapangan), dengan menekankan pada analisis proses partisipasi publik, bentuk kolaborasi antara pemuda dan aktor pemerintahan, serta strategi pelayanan publik yang bersifat inovatif dan berkelanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Administrasi Publik dan Tata Kelola Pembangunan Daerah

Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang membahas bagaimana kebijakan publik dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi melalui organisasi pemerintahan serta partisipasi aktor non-pemerintah. Dalam konteks pembangunan daerah, administrasi publik berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menyediakan layanan publik yang efisien, efektif, dan akuntabel (Denhardt & Denhardt, 2015).

Pelayanan publik tidak lagi hegemoni Negara melainkan bagian dari totalitas kehidupan masyarakat suatu negeri. Grindle menjelaskan reformasi pelayanan publik itu haruslah diarahkan untuk mencermati dan membenahi berbagai kesalahan kebijakan di masa lalu maupun kebijakan yang berlaku sekarang serta pengaturan kelembagaan yang ada (Grindle, 1991). Reformasi pelayanan publik itu harus menjangkau perubahan yang mendasar dalam rutinitas kerja administrasi, budaya birokrasi, dan prosedur kerja instansi pemerintah guna memungkinkan dikembangkannya kepemimpinan yang berwatak kerakyatan pada birokrasi publik. Dalam model *new public service*, yang merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik dilandaskan pada teori demokrasi yang mengajarkan adanya egaliter dan persamaan hak di antara warga Negara. Dasar teoritis kebijakan pelayanan publik yang ideal menurut Denhart dan Denhart bahwa paradigma *New Public Service* adalah pelayanan publik harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai yang ada (Denhart dan Denhart, 2015). Pelaksanaan kebijakan pelayanan publik merupakan proses perubahan dalam sistem administrasi publik. Perubahan tersebut berkaitan dengan paradigma administrasi publik, yaitu proses perubahan

dari paradigma *New Public Management* (NPM) kepada *New Public Service* (NPS). Denhard dan Denhard (2015) menawarkan pendekatan *new public service*, sebuah pendekatan yang berfokus pada tujuh pokok pikiran yakni: 1) layani warga, bukan pelanggan (*serve citizens, not customers*); 2) cari interes publik (*seek the public interest*);

3) mengutamakan kepentingan warga daripada kewirausahaan (*value citizenship over entrepreneurship*); 4) berpikir strategis, berbuat demokratis (*think strategically, act democratically*); 5) mengetahui bahwa akuntabilitas bukan masalah yang sederhana (*recognize that accountability is not simple*); 6) lebih melayani dibandingkan mengatur (*serve than steer*) dan 7) mengatasi manusia, bukan hanya produktivitasnya saja (*value people, not just productivity*) Realisasi perubahan paradigma administrasi publik juga memiliki bunyi bahwa pentingnya pembentukan manajemen publik untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan di segala aspek, karena dalam proses perubahan terdapat proses administrasi yang berkaitan dengan pengembangan, perjanjian yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi yang diinginkan yang bertujuan kepada perubahan publik yang lebih modern (Kikutadze, 2015). Efektivitas pelayanan publik dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang dihasilkan. Bahwa kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara kenyataan atas pelayanan yang diterima dengan harapan atas pelayanan yang ingin diterima (Afrial, 2009). Administrasi publik adalah ilmu dan praktik penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Di tingkat pusat maupun daerah, administrasi publik berfungsi sebagai alat utama untuk mengimplementasikan kebijakan, mengelola sumber daya, dan memastikan masyarakat menerima layanan yang mereka butuhkan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, administrasi publik mencakup:

- 1) Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah
- 2) Pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan daerah
- 3) Penyediaan layanan publik lokal (pendidikan, kesehatan, infrastruktur)
- 4) Pengawasan dan evaluasi program pembangunan daerah

Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, responsif, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Tata Kelola Pembangunan Daerah Tata kelola pembangunan daerah, khususnya dalam sektor pariwisata, menekankan pentingnya kolaborasi antar aktor (*multi actors governance*) dan prinsip *good governance*, yang meliputi transparansi, partisipasi, responsivitas, dan akuntabilitas. Pemerintah daerah dituntut untuk melibatkan masyarakat secara aktif, termasuk kelompok pemuda, dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik guna menjamin keberlanjutan program pembangunan.

Tata kelola pembangunan daerah merujuk pada cara-cara pemerintah daerah mengatur, mengelola, dan melaksanakan proses pembangunan secara partisipatif, transparan, dan berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Karakteristik Tata Kelola Pembangunan Daerah yang Baik:

- a) Partisipatif: Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, misalnya melalui *Musrenbang* (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).
- b) Transparan: Proses pembangunan dapat diakses dan dipantau publik, termasuk anggaran dan progres proyek.
- c) Akuntabel: Pemerintah daerah bertanggung jawab atas hasil pembangunan kepada DPRD dan masyarakat.
- d) Responsif: Pembangunan diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat.
- e) Efisien dan Efektif: Pembangunan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil maksimal.
- f) Berorientasi pada hasil dan keberlanjutan: Proyek-proyek pembangunan dirancang untuk dampak jangka panjang.

Tata kelola pembangunan pariwisata daerah adalah proses bagaimana pemerintah daerah mengelola sektor pariwisata secara partisipatif, transparan, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan daya saing daerah.

Pembangunan pariwisata tidak hanya melibatkan pembangunan infrastruktur fisik (hotel, jalan, tempat wisata), tetapi juga mencakup:

- 1) Penguatan kelembagaan pariwisata
- 2) Pengelolaan sumber daya alam dan budaya secara lestari
- 3) Peningkatan kapasitas masyarakat lokal
- 4) Pemasaran destinasi secara efektif

Unsur Penting dalam Tata Kelola Pariwisata Daerah

- a) Partisipasi
- b) Transparansi
- c) Akuntabilitas
- d) Efisiensi dan Efektivitas
- e) Keadilan
- f) Keberlanjutan

Teori yang terkait dengan tata kelola Pembangunan Pariwisata

1) *Good Governance Theory*

Dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dan World Bank, teori ini menekankan pentingnya:

- a) Transparansi
- b) Akuntabilitas
- c) Efektivitas
- d) Partisipasi
- e) Keadilan hukum

2) *Collaborative Governance Theory* (Ansell & Gash, 2008)

Teori ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan.

Dalam pembangunan pariwisata:

- a) Pemerintah daerah memfasilitasi
- b) Swasta berinvestasi dan mengembangkan usaha wisata
- c) Komunitas lokal menjaga budaya, tradisi, dan alam sekitar

3) *Sustainable Tourism Development Theory*

Fokus pada pariwisata yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tapi juga mempertahankan lingkungan, budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat. Tiga pilar keberlanjutan dalam teori ini:

- a) Ekonomi – menciptakan lapangan kerja dan pendapatan
- b) Sosial-budaya – memperkuat identitas lokal
- c) Lingkungan – melindungi alam dan sumber daya

4) *Stakeholder Theory*

Dalam konteks tata kelola pariwisata, semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat, LSM, investor, dan wisatawan harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan destinasi.

Administrasi publik menyediakan struktur, proses, dan SDM untuk melaksanakan pembangunan daerah. Tata kelola pembangunan daerah memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan cara yang baik, sesuai prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah. Jika suatu kabupaten membangun sistem irigasi, administrasi publik akan mengelola aspek teknis perencanaan, anggaran, pelaksanaan proyek, dan pelaporan. Sedangkan tata kelola pembangunan menekankan bagaimana masyarakat petani dilibatkan, bagaimana anggaran diumumkan secara terbuka, dan bagaimana proyek ini diawasi serta dipertanggungjawabkan.

2.2 **Partisipasi Publik dalam Perspektif Administrasi Publik**

Partisipasi publik adalah salah satu pilar utama dalam tata kelola modern. Dalam pendekatan *New Public Governance* (Osborne, 2006), partisipasi publik tidak hanya dimaknai sebagai pelibatan simbolik, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kolaborasi nyata dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi publik meliputi berbagai bentuk, mulai dari konsultasi, pelibatan dalam pelaksanaan program, hingga *co-production* dalam penyediaan layanan publik.

Dalam sektor pariwisata, partisipasi publik dapat memperkuat legitimasi kebijakan, meningkatkan akseptabilitas program, dan mendorong inovasi layanan berbasis lokal. Keterlibatan pemuda sebagai bagian dari partisipasi publik mencerminkan prinsip *inclusive governance*, yang menempatkan setiap kelompok

masyarakat sebagai subjek pembangunan. Partisipasi publik adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam perspektif administrasi publik, partisipasi publik dipandang sebagai bagian integral dari proses demokrasi dan peningkatan kualitas kebijakan, karena masyarakat berperan tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan pengambilan keputusan. *Public participation is central to democratic governance and public administration. It promotes responsive, accountable, and inclusive public service delivery.* (Henry 2013).

Teori Partisipasi Publik.

1) Teori Demokrasi Partisipatoris

Dalam buku *"Participation and Democratic Theory"*, Pateman menyatakan bahwa partisipasi aktif warga negara dalam proses politik meningkatkan kapasitas demokratis dan menciptakan warga negara yang lebih bertanggung jawab. Dalam konteks administrasi publik, ini berarti bahwa keputusan administratif seharusnya tidak hanya dibuat oleh birokrat, tetapi juga dengan input dari publik. (Carole Pateman, 1970)

2) Teori Administrasi Responsif (*Responsive Administration*)

"A responsive bureaucracy is one that listens and adapts based on citizen input." (Rosenbloom, 1983)." Administrasi publik modern tidak bisa hanya bersifat teknokratis dan hirarkis, tapi harus responsif terhadap kebutuhan warga. Partisipasi publik menjadi mekanisme utama untuk menangkap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi adalah sebuah hubungan kekuasaan atau dari relasi ekonomi politik yang sudah dianjurkan oleh demokrasi. Dalam sebuah negara demokrasi pemerintah harus dapat turun langsung mengatasi permasalahan warganya. Terdapat sebuah konsep dasar dari sebuah pengembangan masyarakat dikarenakan terdapat partisipasi yang kuat dengan adanya HAM.

Pada suatu unsur pemerintahan daerah, pemerintah menjadikan masyarakat sebagai sebuah objek dan juga subjek pembangunan yang memungkinkan terciptanya suatu pembangunan yang maksimal. Pembangunan tidak selalu berfokus pada sebuah perkotaan saja, namun juga didesa. Atas dasar itulah yang

menjadikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang selalu diusahakan supaya dikembangkan mulai dari masyarakat desa sampai pada masyarakat kota. Berhasilnya suatu program pembangunan desa untuk mendukung terciptanya tujuan bangsa, selain tergantung pada peran aktif masyarakat, sikap peduli, semangat dan ketaatan dari pemerintah itu sendiri sangat ditentukan dalam proses pelaksanaan pembangunan suatu desa. Bentuk- bentuk partisipasi masyarakat menurut Huraerah dalam (Laksana, 2013) terdiri dari berbagai aspek, berikut penjelasannya.

- a) Partisipasi buah pikiran
- b) Partisipasi tenaga
- c) Partisipasi harta benda
- d) Partisipasi keterampilan
- e) Partisipasi sosial

Partisipasi masyarakat juga dapat dibagi berbagai bentuk, menurut Rusidi dalam Siregar (2001:21) mengungkapkan bahwa ada empat dimensi dalam sebuah partisipasi :

- a) Ide atau gagasan
- b) Dana, alat dan barang
- c) Bekerja ataupun memberi kerja
- d) Melaksanakan dan memanfaatkan pelayanan pembangunan

Menurut Thubany dalam Purnamasari (2006:23) partisipasi penuh bisa terwujud apabila struktur kelembagaan yang memungkinkan masyarakat dapat bergabung langsung dan memutuskan sebuah persoalan masyarakat yang telah terwakili secara proporsional didalam setiap proses pengambilan kebijakan bersama. Oleh karena itu sebuah partisipasi harus berdasarkan pada pembuatan keputusan, penerapan keputusan, menikmati hasil, dan juga evaluasi hasil. Kemudian terdapat aspek yang menjadikan sebuah indikasi terbangunnya partisipasi, yaitu :

- a) Informasi atau akses yang lain
- b) Inisiatif
- c) Mekanisme pengambilan keputusan

d) Kontrol pengawasan

Berdasar pada uraian tersebut, dapat dilihat dari perkembangan partisipasi yang tidak lagi diasumsikan sebagai pemberian sebuah kontribusi yang berupa sarana masyarakat secara sukarela, namun lebih mengarah kepada pengembangan kapasitas masyarakat yang ada didalamnya terdapat sebuah unsure ikutsertaan masyarakat dalam informasi, pengambilan sebuah keputusan dan kontrol serta pengawasan terhadap kebijakan yang mempengaruhi masyarakat kedepannya.

Mengingat kembali bahwa sebuah daya tarik sebuah tempat tertentu, pemerintah selalu berusaha untuk dapat menjadikan sebuah wilayah yang berpotensi menjadi sebuah tempat yang dapat dikenal banyak orang atau menjadi sebuah tempat pariwisata. Tentunya bukan hanya dari peran pemerintah saja yang menangani pengembangan desa wisata, namun juga harus dari masyarakat yang berada di desa tersebut yang justru sangat dibutuhkan dalam usaha itu. Kerjasama yang bagus nantinya akan memperlancar sebuah pengembangan desa wisata.

Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa latin *pars* yang artinya bagian, dan *capare* yang artinya mengambil. Sehingga partisipasi diartikan “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Sehingga partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. Mengenai partisipasi Mikkelsen merumuskan beberapa arti dari partisipasi, diantaranya yaitu:

- 1) Partisipasi diartikan sebagai kepedulian masyarakat dengan menerima serta menanggapi terhadap beberapa program. Akan tetapi pengertian seperti ini kurang tepat, dikarenakan hanya sekedar meminta dukungan dari masyarakat, sehingga tahap perencanaan atau pengambilan keputusan sekedar ajang formalitas saja.
- 2) Partisipasi diartikan sebagai kontribusi sukarela kepada program- program yang ada tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Partisipasi jenis ini lebih menekankan pada penghematan biaya dalam melaksanakan suatu program atau proyek dari pemerintah. Masyarakat harus terlibat dalam program pemerintah secara gratis, dengan alasan program tersebut akhirnya

ditujukan kepada masyarakat juga. Semakin menghemat biaya semakin besar partisipasi masyarakat.

- 3) Partisipasi adalah suatu proses keterlibatan dalam pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah. Partisipasi seperti ini memberikan keterlibatan secara luas, dikarenakan tahap-tahap melaksanakan program dari tahap mengidentifikasi masalah hingga tahap mitigasi melibatkan pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan.
- 4) Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan oleh masyarakat sendiri. Partisipasi ini menitikberatkan pada sikap sukarela masyarakat untuk menjalankan suatu program yang telah ditentukan sendiri.

Bentuk partisipasi masyarakat, apabila dilihat dari proses pembangunan suatu program pembangunan, mulai dari gagasan sampai pada bentuknya bangunan, partisipasi terbagi menjadi dua jenis menurut Ndraha dalam bukunya Mokh. Solechan, yaitu partisipasi prosedural dan partisipasi proses. Partisipasi prosedural yaitu partisipasi yang dilakukan sepanjang proses, sedangkan partisipasi parsial yaitu partisipasi yang hanya dilakukan pada beberapa tahap saja.

Sedangkan menurut Rusdi dalam bukunya Mokh. Solechan juga ada empat dimensi dalam berpartisipasi, yaitu (1) sumbangan ide atau gagasan, (2) sumbangan materi, dapat berupa dana, barang atau alat, (3) sumbangan tenaga, (4) memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan. Dapat dikatakan bahwa partisipasi tidak sekedar dilihat dari aspek fiskal semata. Selama ini, ada kesan bahwa seseorang berpartisipasi ketika sudah terlibat secara langsung atau secara fisik, padahal esensi yang terkandung dalam partisipasi tidak sesempit itu, inisiatif ataupun sumbangan ide maupun gagasan masyarakat sebenarnya dapat dikatakan sebagai wujud partisipasi. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan konsep partisipasi sekedar dimaknai sebagai keterlibatan dalam memberikan partisipasi secara material. Warga masyarakat yang mampu memberikan bantuan program pembangunan dalam jumlah yang besar berarti telah berpartisipasi secara aktif dalam menyukseskan jalannya proses pembangunan.

Partisipasi publik merupakan elemen kunci dalam administrasi publik modern yang demokratis dan responsif. Dalam perspektif ini, partisipasi bukan hanya hak warga negara, tetapi juga mekanisme penting untuk meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, serta kualitas kebijakan dan pelayanan publik. Melalui teori-teori seperti Demokrasi *Partisipatoris* (Carole Pateman), *Ladder of Participation* (Sherry Arnstein), dan Administrasi Responsif (David Rosenbloom), partisipasi dipahami sebagai proses dinamis yang mengharuskan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pemerintahan dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan.

Pemerintahan yang membuka ruang partisipasi cenderung lebih transparan, inklusif, dan memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Namun, partisipasi yang bermakna memerlukan prasyarat seperti kapasitas masyarakat, keterbukaan pemerintah, serta mekanisme yang menjamin keterlibatan nyata, bukan simbolik. Oleh karena itu, dalam administrasi publik kontemporer, partisipasi publik bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkeadilan.

2.3 Peran Pemuda Dalam Pembangunan

Pemuda adalah agen perubahan (*agents of change*) yang memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan berbasis inovasi, kreativitas, dan energi sosial. Dalam konteks pembangunan daerah, pemuda tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam berbagai aspek kehidupan publik. Pemberdayaan pemuda menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan partisipatif.

Menurut UNDP, pemberdayaan pemuda harus diarahkan pada penciptaan ruang partisipatif yang adil dan mendalam dalam pengambilan keputusan publik, akses terhadap informasi, serta keterlibatan dalam penciptaan nilai sosial dan ekonomi. Dalam administrasi publik, hal ini dapat diposisikan dalam kerangka *citizen engagement*, yang memberi ruang pada pemuda untuk menjadi *co-creator* layanan dan kebijakan publik. □ Pemuda dilibatkan dalam *hackathon* atau lomba inovasi digital untuk menciptakan aplikasi layanan publik, seperti aplikasi pelaporan

sampah atau aplikasi informasi transportasi publik. Mereka tidak hanya pengguna, tetapi juga merancang fitur, alur layanan, dan strategi komunikasi agar layanan lebih mudah diakses (UNDP, 2020)

Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Negara dalam hal ini memiliki peran penting dalam pembangunan kepemudaan Indonesia. Karenanya Menteri Pemuda dan Olahraga mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 59 tahun 2013 tentang pengembangan kepemimpinan pemuda. Peraturan ini diharapkan mampu melaksanakan secara sistematis proses pembangunan kepemudaan di Indonesia.

Pembangunan kepemudaan akan menghasilkan pemuda yang mampu bersaing dan berdaya guna. Sebagaimana amanat UU No. 40 tahun 2009 bahwa pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan layak menjadi perhatian pemerintah. Dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) kepemudaan, kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan meliputi: 1) peningkatan *character building*, revitalisasi, dan konsolidasi gerakan kepemudaan; 2) revitalisasi gerakan pramuka; 3) pengembangan penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kreativitas pemuda; 4) penyadaran pemuda; 5) pemberdayaan pemuda; 6) pengembangan kepemimpinan pemuda; 7) pengembangan kewirausahaan pemuda; 8) pengembangan kepeloporan atau kreativitas pemuda; 9) peningkatan koordinasi dan kemitraan kepemudaan; 10) pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan; 11) pemberdayaan organisasi kepemudaan; 12) peningkatan peran serta masyarakat; dan 13) pengembangan penghargaan kepemudaan (RPJM, 2010).

Kondisi tersebutlah yang membuat peranan pemuda sebenarnya penting dalam proses pembangunan bangsa Indonesia maupun sebagai penerus bangsa. Tanpa adanya peranan generasi muda atau pemuda Indonesia maka bangsa Indonesia pastinya akan sulit mengalami perubahan dan akan mudah pula kehilangan identitas bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa sebenarnya memiliki beberapa peranan yang seharusnya dapat dilakukan oleh para pemuda Indonesia.

Keberadaan pemuda yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan merupakan salah satu solusi dari upaya pemberdayaan masyarakat sekitarnya (Satries, 2009). Sebab pemuda dengan segala potensinya diharapkan mampu mengangkat derajat masyarakat sekitar melalui berbagai kegiatan dan organisasi yang didirikannya. Dengan begitu pemuda memiliki peranan penting dalam pembangunan, baik berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan sektor pariwisata. Indonesia dengan penduduk yang besar dan lahan sektor pariwisata yang luas, tentu saja membutuhkan peran optimal dari generasi muda dalam mengelola sektor pariwisata secara serius.

1) Pemuda Sebagai Agen Perubahan

Menurut Griffin dan Pareek bahwa agen perubahan adalah orang profesional yang tugasnya membantu masyarakat atau kelompok merencanakan pembangunan atau membentuk kembali sasaran, fokus pada masalah, mencari pemecahan yang mungkin, mengatur bantuan, merencanakan tindakan yang dimaksud untuk memperbaiki situasi, mengatasi kesulitan, dan mengevaluasi hasil dari usaha yang terencana (Marius, 2006). Agen perubahan selalu menanamkan pada dirinya sikap optimis, Pola pikir yang cerdas serta pola perilaku yang baik demi terciptanya sebuah perubahan yang diharapkan.

Peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia yang pertama dapat dilihat dari peran pemuda sebagai agen perubahan. Artinya bahwa pemuda Indonesia sebenarnya memiliki peranan untuk menjadi pusat dari kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui pengadaan

perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat, baik secara nasional maupun daerah, menuju kepada arah yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa ada pernyataan seperti peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa, karena yang menentukan kemajuan bangsa Indonesia dimasa depan adalah para generasi mudanya melalui keberhasilan perubahan-perubahan positif yang dapat dilakukan.

Memang berbagai macam tantangan pastinya akan dihadapi atau dialami oleh para generasi muda, tetapi setidaknya para pemuda dapat kembali menengok pada makna sumpah pemuda atau pun makna kemerdekaan Indonesia. Dimana segala tantangan yang ada akan dapat dihadapi jika perbedaan-perbedaan yang ada dapat dihadapi dengan positif dan dilakukan secara bersama-sama yang juga sesuai dengan asas Bhinneka Tunggal Ika. Seperti melalui upaya saling memotivasi dan mendorong adanya kemajuan pada masyarakat. Salah satu kunci agar dapat sukses menjadi agen perubahan pastinya adalah keyakinan yang dimiliki para pemuda, maksudnya adalah para generasi muda harus yakin akan apa yang mereka miliki dan selalu melakukannya dengan baik dan benar.

2) Pemuda Sebagai Agen Pembangunan

Selain menjadi agen perubahan, peran pemuda juga sebagai agen pembangunan penerus bangsa. Artinya bahwa para pemuda Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang, baik pembangunan nasional maupun pengembangan daerah kemudian memperkenalkannya pada dunia internasional, dimana tugas dari seorang pemuda sebagai agen pembangunan adalah sebagai penggerak atau motivator, mensosialisasikan potensi pariwisata serta menjadi garda terdepan dalam mengembangkan sektor pariwisata agar dapat bermanfaat bagi masyarakat (Karsidi R, 2011).

Mengapa agen pembangunan juga menjadi suatu peran penting pemuda sebagai penerus bangsa? Hal ini disebabkan karena para pemuda Indonesia

wajib menjaga eksistensi bangsa Indonesia di kancah dunia, serta selalu dapat memberikan kesan yang baik di mata dunia. Sebagai contoh seperti mengembangkan bidang kebudayaan daerah Indonesia, kemudian memperkenalkannya pada dunia internasional. Bahkan agen pembangunan disini bukan hanya sebatas pembangunan fisik maupun non fisik secara nasional dan daerah saja, tetapi juga menyangkut mengenai kemampuan pengembangan potensi generasi muda lainnya.

Artinya adalah diperlukan adanya upaya bagaimana potensi dan produktivitas yang ada di diri para generasi muda dapat dikembangkan secara bersama-sama demi mencapai tujuan pengembangan bangsa Indonesia dimana sekarang maupun dimasa yang akan datang.

3) Pemuda Sebagai Agen Modernisasi

Pemuda bertindak sebagai pelopor pembaharuan ke arah modern tanpa menghilangkan bentuk aslinya, artinya bahwa para pemuda Indonesia wajib memiliki kemampuan dalam menganalisis perubahan zaman, memiliki kreativitas yang tinggi, mandiri dalam bertindak dan berfikir, serta memiliki inovasi pembaharuan yang pastinya memberi pengaruh besar pada bangsa Indonesia, sehingga mereka dapat memilih mana yang memang perlu untuk diubah dan juga mana yang seharusnya dipertahankan (Derajad S. 2014).

Sebagai contoh seperti perkembangan teknologi yang semakin maju di berbagai bidang, dimana melalui aktivitas pemuda pula bangsa Indonesia kemudian dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang semakin maju, sehingga tidak menjadi suatu bangsa yang tertinggal. Namun dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju dan modern juga menjadikan segala pengaruh bahkan kebudayaan asing masuk lebih mudah, maka di sinilah muncul tantangan bagi pemuda Indonesia untuk tetap dapat mempertahankan identitas bangsa Indonesia.

2.4 Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan

Tata kelola pariwisata berkelanjutan mengacu pada proses pengelolaan sumber daya pariwisata yang memperhatikan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Dalam literatur pariwisata, pembangunan berkelanjutan menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, komunitas lokal, pelaku usaha, dan kelompok muda. Tata kelola pariwisata berkelanjutan dalam perspektif administrasi publik berarti membangun kebijakan dan program pariwisata yang bersifat kolaboratif, responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan berbasis potensi lokal.

Hal ini menuntut keterbukaan pemerintah terhadap partisipasi komunitas, serta kesiapan masyarakat, termasuk pemuda, untuk turut serta dalam merancang dan mengelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan.

Tata kelola pariwisata berkelanjutan mengacu pada pengelolaan sektor pariwisata yang memperhatikan tiga aspek utama: lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi, yang sering dikenal dengan konsep *Triple Bottom Line*. Konsep ini berfokus pada keberlanjutan jangka panjang dari destinasi wisata melalui pengelolaan yang bijaksana, bertanggung jawab, dan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Tata kelola pariwisata berkelanjutan bukan hanya tentang menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan destinasi pariwisata menjaga keseimbangan ekologis dan mendukung kesejahteraan masyarakat lokal.

Tata kelola pariwisata berkelanjutan adalah pendekatan untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola pariwisata dengan cara yang memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk memastikan bahwa sumber daya alam dan budaya yang ada dapat digunakan untuk kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Menurut World Tourism Organization (UNWTO): "*Sustainable tourism is tourism that meets the needs of present tourists and host regions while protecting and enhancing opportunities for the future.*" Dengan demikian, tujuan utama dari

tata kelola pariwisata berkelanjutan adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara wisatawan, industri pariwisata, dan masyarakat lokal, sambil menjaga kelestarian alam dan budaya. Tata kelola pariwisata berkelanjutan memiliki tiga pilar utama yang harus dijaga agar sektor pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan, yaitu

1) Pilar Lingkungan (*Environmental Sustainability*)

- a) Konservasi Alam: Menjaga kelestarian sumber daya alam dan ekosistem di sekitar destinasi wisata (contoh: taman nasional, hutan, dan kawasan konservasi).
- b) Pengelolaan Sumber Daya Alam: Penggunaan sumber daya alam yang bijaksana untuk menghindari eksploitasi yang berlebihan, seperti pengelolaan air, energi, dan pengurangan polusi.
- c) Perlindungan Keanekaragaman Hayati: Menghindari kerusakan pada habitat alam yang penting untuk keanekaragaman hayati dan memastikan bahwa flora dan fauna lokal tetap terjaga.
- d) Pengelolaan Sampah dan Limbah: Pengurangan produksi sampah, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah yang lebih efisien.

2) Pilar Sosial-Budaya (*Social and Cultural Sustainability*)

- a) Pemberdayaan Komunitas Lokal: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui partisipasi aktif dalam industri pariwisata, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pelatihan keterampilan.
- b) Pelestarian Budaya dan Warisan Lokal: Menghargai dan melindungi tradisi, seni, dan kebudayaan lokal yang menjadi daya tarik pariwisata.
- c) Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran baik bagi wisatawan maupun masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga lingkungan dan budaya dalam pariwisata.
- d) Keberagaman dan Inklusi: Memastikan bahwa manfaat pariwisata dapat

dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan ketimpangan sosial.

3) Pilar Ekonomi (*Economic Sustainability*)

- a) Pembangunan Ekonomi yang Merata: Memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari sektor pariwisata dapat didistribusikan secara adil kepada masyarakat lokal, tanpa menciptakan ketergantungan yang berlebihan pada sektor pariwisata.
- b) Pendapatan yang Berkelanjutan: Membantu menciptakan pendapatan yang dapat bertahan lama bagi masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan peluang kerja yang berkaitan dengan sektor pariwisata.
- c) Diversifikasi Ekonomi: Mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata dengan mendorong pengembangan sektor-sektor lain yang juga bisa mendukung ekonomi lokal, seperti pertanian atau kerajinan tangan.

Pariwisata merupakan industri yang berkembang dengan tantangan yang cukup besar, banyak usaha yang dilakukan untuk mengembangkan sebuah pariwisata, di antaranya menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas dan organisasi serta bagaimana mempertahankan praktik lingkungan yang baik (Paul Herbig, 1997).

Freedman (1995) secara serupa mendefinisikan pariwisata sebagai sebuah segmen industri perjalanan yang menarik untuk sadar lingkungan dan memiliki dampak yang rendah pada daerah sekitar tapi memberi kontribusi terhadap ekonomi lokal. Menurut Cater dan Lowman, (1994) pariwisata seharusnya dapat: 1. Menarik wisatawan ke lingkungan alam yang unik dan dapat diakses; 2. Digunakan untuk meningkatkan konservasi alam melalui pendidikan; 3. Menyebabkan perubahan sikap di masyarakat dan pemerintah lokal; 4. Menyediakan lapangan kerja dan peluang kewirausahaan bagi masyarakat lokal.

Menurut Weaver (2008:17) Di era modern, pariwisata didefinisikan sebagai suatu bentuk pariwisata yang menumbuhkan pengalaman belajar dan apresiasi terhadap

lingkungan alam, atau komponennya, dalam hal konteks budaya, dikelola sesuai dengan praktik terbaik industri untuk dicapai hasil yang berkelanjutan dan sosial-budaya serta berdampak terhadap perekonomian.

1) Komponen Pengembangan Pariwisata

Menurut Buhalis (2000) dalam Anggraini (2017), dalam menganalisis destinasi pariwisata terdapat komponen utama yang dikarakteristikan sebagai enam kerangka A, yaitu Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, *Available Packages* (Paket wisata yang tersedia), Aktivitas, dan *Ancillary Services* (Layanan tambahan). Sehingga destinasi dapat dihubungkan dengan kombinasi seluruh produk, jasa, dan pengalaman yang ditawarkan. Komponen tersebut dapat membantu melihat dampak pariwisata secara regional serta mengatur penawaran dan permintaan untuk memaksimalkan manfaat kepada seluruh pelaku.

Tiga komponen dasar dari pariwisata inilah yang dikenal sebagai 3 A pariwisata. Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas (3A) ini merupakan komponen-komponen yang menjadi perhatian utama pemerintah pusat karena ketiga atribut ini terkait dengan masalah konektivitas, tumpang tindih kewenangan dan banyaknya pihak keberpentingan di kawasan pariwisata sehingga memerlukan koordinasi lintas sektor.

Komponen atraksi dapat dianggap sebagai salah satu komponen dasar pariwisata yang sangat penting karena merupakan tujuan utama wisatawan untuk melakukan perjalanan ke destinasi wisata tertentu. Atraksi merupakan daya tarik wisata yang telah disiapkan untuk dinikmati oleh wisatawan. Komponen penting selanjutnya adalah aksesibilitas atau kemampuan untuk mencapai tempat tujuan melalui berbagai sarana transportasi. Kegiatan kepariwisataan tergantung kepada aksesibilitas karena salah satu faktor yang mempengaruhi wisatawan melakukan perjalanan wisata adalah masalah jarak tempuh dan waktu. Aksesibilitas ini berkaitan dengan transportasi dan prasarana transportasi. Transportasi yang baik dapat mengakibatkan jarak seakan- akan menjadi dekat dan sementara prasarana transportasi ini menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya. Suatu destinasi wisata

yang tidak memiliki aksesibilitas yang baik akan menyebabkan terhalangnya wisatawan menuju tempat wisata tersebut sehingga tidak dapat berkembang dengan baik. Amenitas adalah fasilitas pendukung yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di kawasan pariwisata. Amenitas ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan bagi wisatawan di suatu destinasi wisata. Hal-hal yang termasuk dalam amenitas adalah kebutuhan akomodasi, fasilitas hiburan dan layanan catering/jasa boga.

Komponen *available packages* (paket wisata) merupakan paket yang menggabungkan beberapa atraksi atau *event* dalam satu kurun waktu, dan dibuat oleh perantara atau pelaku utama. Biasanya paket wisata memudahkan wisatawan untuk merasakan dan mengalami berbagai atraksi dalam satu kesatuan waktu. Aktivitas diartikan sebagai tindakan dan perilaku orang-orang saat persiapan dan perjalanan dalam kapasitasnya sebagai konsumen (UNWTO, 2008). Dengan kata lain aktivitas merupakan kegiatan yang dilakukan wisatawan di destinasi tujuan selama kunjungan. Salah satunya dengan mengikuti *event* (acara) yang diselenggarakan, seperti upacara, festival, pameran. *Event* merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan, karena memberikan pengalaman yang unik dan berbeda dari tempat asalnya. Sementara *ancillary services* (layanan tambahan) adalah layanan pendukung yang akan digunakan wisatawan, seperti bank, telekomunikasi, surat menyurat, rumah sakit, berita.

2) Indikator Pengembangan Pariwisata

Menurut Weaver (2008) ada 3 poin penting sekaligus menjadi dasar indikator pariwisata meliputi 3 aspek yakni:

a) Lingkungan

Lingkungan dalam sektor pariwisata merupakan faktor utama yang menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi objek wisata yang ditawarkan. Dengan menawarkan kondisi lingkungan yang terjaga keaslian dari alamnya, maka akan meningkatkan kualitas dari suatu objek pariwisata. Dari aspek lingkungan menjelaskan bagaimana dalam

pelaksanaan pariwisata berkelanjutan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata, mempertahankan proses ekologi dan turut andil dalam melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati di suatu destinasi wisata, maka untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan perlu adanya pemanfaatan serta penjagaan terhadap lingkungan yang menjadi kunci dalam pengembangan pariwisata. Penjagaan baik dari segi kebersihan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kehidupan masyarakat lokalnya

b) Sosial Budaya

Aspek sosial-budaya memiliki peranan untuk menjaga atau menghormati keaslian sosial budaya masyarakat setempat, melestarikan nilai-nilai warisan budaya, adat yang mereka bangun, dan berkontribusi untuk meningkatkan rasa toleransi serta pemahaman antar-budaya. Menurut Soedjatmiko hal tersebut bisa terjadi apabila manusia dan struktur sosialnya mempunyai mental dewasa, sehingga berpartisipasi secara kreatif, ada “*innerwill*”, dan proses emansipasi diri (Listyaningsih, 2014)

Adanya aspek sosial-budaya memiliki peranan untuk melestarikan sosial dan budaya di sekitar objek wisata. Untuk tercapainya *sustainable tourism* tentunya harus mempertimbangkan dari kebudayaan masyarakat, nilai-nilai warisan dan adat yang sudah ada secara turun menurun. Aspek sosial-budaya yang dipertahankan dalam suatu pembangunan, maka hal tersebut akan menjadi suatu nilai lebih.

c) Ekonomi

Memastikan kegiatan ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial ekonomi kepada semua *stakeholder* dengan andil, seperti pekerjaan tetap, kesempatan mendapatkan penghasilan yang menyokong industri pariwisata dan ekonomi

kreatif, dan pelayanan sosial kepada masyarakat lokal. pariwisata sebagai aktivitas ekonomi yang harus dilihat dari dua sisi yakni sisi permintaan (*demand side*) dan sisi pasokan/penawaran (*supply side*), keberhasilan dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah tergantung kepada kemampuan perencanaan dalam mengintegrasikan kedua sisi tersebut secara berimbang ke dalam sebuah rencana pengembangan pariwisata.

2.5 Teori Empowerment dalam Administrasi Publik

Konsep *empowerment* atau pemberdayaan memiliki relevansi yang kuat dengan peran strategis pemuda dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan. pemberdayaan menjadi kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana pemuda dapat didorong untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan pariwisata, tetapi juga sebagai subjek aktif yang memengaruhi arah dan kualitas kebijakan pariwisata lokal. Proses pemberdayaan meliputi pengembangan kapasitas, peningkatan kesadaran kritis terhadap isu lingkungan dan sosial di sektor pariwisata, serta pemberian akses terhadap sumber daya dan ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan. Konsep *empowerment* atau pemberdayaan merujuk pada proses peningkatan kapasitas individu atau kelompok agar dapat mengendalikan kehidupan mereka sendiri dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Zimmerman (2000) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses multidimensional yang mencakup kontrol pribadi, pengaruh terhadap lingkungan sosial politik, serta peningkatan kesadaran kritis individu terhadap konteks sosialnya. Proses ini melibatkan pengembangan keterampilan, akses terhadap sumber daya, serta kesempatan untuk mengambil keputusan secara mandiri dan bermakna. *Empowerment* (pemberdayaan) didefinisikan sebagai proses meningkatkan kapasitas individu atau kelompok untuk mengambil kontrol atas kehidupan mereka melalui penguatan akses terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, dan peluang partisipasi (Rappaport, 1987). Dalam konteks administrasi publik, *empowerment* tidak hanya mencakup pemberian wewenang, tetap

juga pembangunan kepercayaan diri, keterampilan, dan jaringan sosial yang memungkinkan masyarakat khususnya pemuda berkontribusi aktif dalam tata kelola pembangunan (Alsop & Heinsohn, 2005). Dalam konteks administrasi publik, pemberdayaan dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok marginal atau belum terlibat aktif, dalam tata kelola publik. Pemuda sebagai bagian dari masyarakat memiliki potensi besar untuk diberdayakan melalui peningkatan kapasitas, pelibatan dalam proses pengambilan kebijakan, serta pemberian ruang dalam forum-forum pembangunan, termasuk dalam sektor pariwisata berkelanjutan. Pemberdayaan dalam hal ini tidak hanya berarti memberikan wewenang formal, tetapi juga membangun kepercayaan diri, keterampilan organisasi, serta jaringan sosial yang memungkinkan pemuda untuk memobilisasi komunitas dan menjadi agen perubahan. Peningkatan partisipasi pemuda dalam tata kelola pariwisata yang berkelanjutan dapat memperkuat legitimasi kebijakan, meningkatkan inovasi dalam pengembangan destinasi, serta memastikan bahwa pembangunan pariwisata berlangsung secara inklusif dan berkeadilan antar generasi. Oleh karena itu, teori empowerment menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana pemuda dapat memainkan peran strategis dalam tata kelola pariwisata yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dalam pemberdayaan pemuda dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan yang baik yaitu sebagai berikut (Zimmerman, 2000)

1) *Intrapersonal empowerment* (Pemberdayaan Intrapersonal)

Mencerminkan kemampuan pemuda untuk merasa mampu dan memiliki kepercayaan diri dalam mengambil tindakan yang berdampak pada pengembangan pariwisata di komunitasnya. Hal ini dapat diwujudkan melalui keterlibatan mereka dalam pengelolaan kegiatan wisata berbasis masyarakat, seperti inisiatif ekowisata atau pelatihan pemandu wisata lokal.

2) *Interactional empowerment* (Pemberdayaan Interaksional)

Pengaruh terhadap lingkungan sosial politik menggambarkan sejauh mana pemuda memiliki akses terhadap ruang partisipatif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pariwisata. Di sinilah aspek administrasi publik

menjadi penting, yaitu bagaimana institusi pemerintah lokal dan sektor lainnya memberikan ruang yang inklusif bagi pemuda untuk berkontribusi, menyuarakan aspirasi, dan ikut serta dalam musyawarah pembangunan pariwisata.

3) *Behavioral empowerment* (Pemberdayaan Perilaku)

Kesadaran kritis berarti pemuda mampu memahami permasalahan sosial, budaya, dan lingkungan yang berkaitan dengan pariwisata, serta mampu menganalisis dampak kebijakan terhadap masyarakat lokal. Kesadaran ini penting agar keterlibatan mereka tidak bersifat simbolik semata, melainkan substantif dan transformatif.

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi aktif pemuda dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemuda tidak hanya dilihat sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi keputusan dan perubahan sosial. Proses pemberdayaan ini mencakup peningkatan kesadaran kritis, penguatan kapasitas individu, serta akses terhadap ruang-ruang pengambilan keputusan. Misalnya, keterlibatan pemuda dalam merancang program edukasi wisata dan konservasi lingkungan dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap destinasi wisata lokal. Melalui indikator *intrapersonal*, *interactional*, dan *behavioral empowerment* sebagaimana dijelaskan Zimmerman (2000), pemuda dapat membangun efikasi diri, memahami dinamika kebijakan pariwisata, serta berpartisipasi dalam tindakan nyata yang mendorong keberlanjutan lingkungan dan sosial. Dalam proses ini, keadilan distribusi manfaat pariwisata dan keberlanjutan jangka panjang menjadi perhatian utama yang dapat dicapai dengan memberdayakan komunitas pemuda secara inklusif dan kolaboratif (Zimmerman, 2000; Alsop & Heinsohn, 2005).

Penerapan konsep pemberdayaan (*empowerment*) dalam konteks pengembangan desa wisata dapat dilihat dalam penelitian Fadhil & Setyowati (2020) yang mengkaji partisipasi pemuda di Desa Wisata Pentingsari, Yogyakarta. Berdasarkan teori Zimmerman (2000), *empowerment*

mencakup tiga aspek utama, yaitu *intrapersonal*, *interactional*, dan *behavioral component*. Ketiga aspek ini terlihat dalam bagaimana pemuda diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan berbasis potensi lokal.

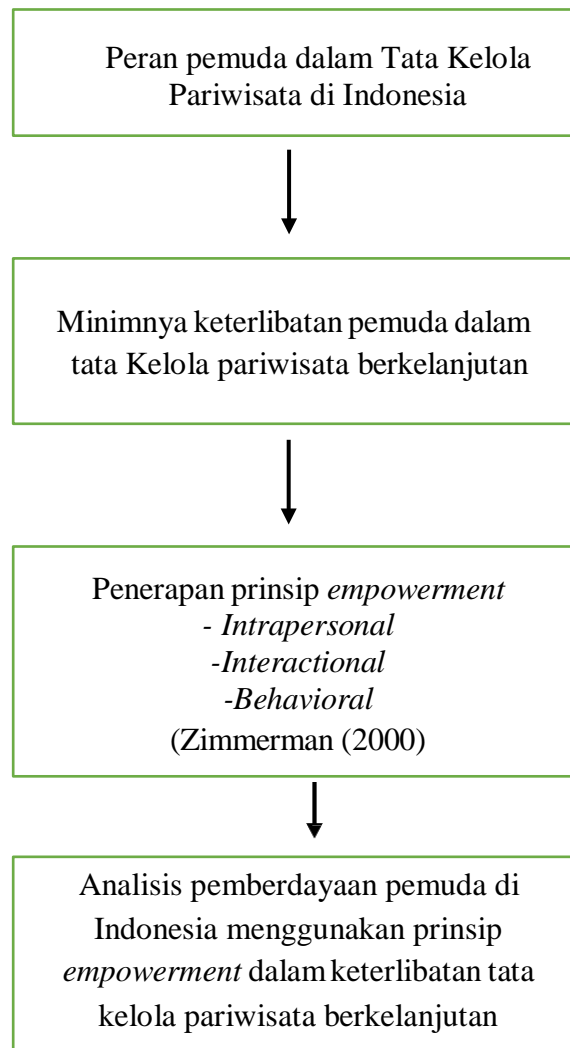
Aspek *intrapersonal* tampak dalam peningkatan kepercayaan diri dan rasa kontrol pemuda terhadap lingkungan mereka, yang tercermin melalui keterlibatan aktif dalam pengelolaan atraksi wisata dan layanan *homestay*. Sementara itu, *interactional component* tercermin dalam kemampuan pemuda mengakses pelatihan, sumber daya, serta jejaring kerja sama yang memperkuat kapasitas mereka dalam memahami sistem sosial pariwisata. Adapun *behavioral component* terlihat dari tindakan konkret para pemuda dalam merancang program budaya, edukasi lingkungan, hingga pengelolaan ekonomi kreatif yang berbasis masyarakat.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan pemuda yang dilakukan secara partisipatif mampu menumbuhkan rasa kepemilikan, memperkuat keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan, serta mendorong transformasi sosial dan ekonomi masyarakat desa. Ini membuktikan bahwa *empowerment* tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga membangun kontribusi aktif pemuda dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip pemberdayaan menurut Zimmerman.

2.6 Kerangka Berpikir

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah minimnya keterlibatan strategis pemuda dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan. Padahal, pemuda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan melalui inovasi, advokasi, dan teknologi. Dalam teori *empowerment*, partisipasi masyarakat adalah pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Partisipasi publik mencakup keterlibatan dalam perencanaan kebijakan, partisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan program serta kontribusi terhadap evaluasi pembangunan pariwisata. Pemuda sebagai bagian dari warga negara, memiliki hak sekaligus kewajiban untuk turut serta dalam pengelolaan sektor publik

termasuk pariwisata. Teori ini digunakan sebagai landasan analitis untuk memahami bagaimana pemuda dapat diberdayakan secara nyata agar berkontribusi dalam tata kelola. Berikut kerangka pikir dalam penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *scoping review* sebagai strategi utama dalam mengeksplorasi dan memetakan literatur yang relevan terhadap isu peran strategis pemuda dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan dalam perspektif administrasi publik. *Scoping review* dipilih karena cocok untuk mengidentifikasi cakupan, luasnya literatur, dan kesenjangan pengetahuan (*research gap*) pada bidang kajian yang kompleks dan multidisipliner seperti pemberdayaan pemuda, tata kelola pariwisata, dan kebijakan publik.

Metode *scoping review* memungkinkan peneliti untuk menyusun peta konseptual dan sistematis atas temuan-temuan ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi berbagai jenis studi, termasuk artikel jurnal, dokumen kebijakan, skripsi, tesis, dan laporan lembaga yang relevan, sehingga dapat memperluas pemahaman terhadap kontribusi pemuda dalam konteks pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata.

Pengumpulan data dilakukan melalui proses penelusuran sistematis menggunakan kata kunci yang disesuaikan dengan domain penelitian, seperti: *youth empowerment*, *public administration*, *sustainable tourism governance*, dan *youth participation*. Sumber data diperoleh dari berbagai pangkalan data daring seperti Google Scholar, dan Scopus, dengan literatur yang dipublikasikan dalam kurun waktu 5–10 tahun terakhir agar tetap relevan dan mutakhir.

Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur terpilih, seperti dimensi pemberdayaan menurut Zimmerman (kontrol pribadi,

kesadaran kritis, dan pengaruh sosial-politik), partisipasi pemuda dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta kebijakan publik yang mendukung tata kelola pariwisata inklusif dan berkelanjutan.

Dengan menggunakan metode *scoping review*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana peran pemuda dalam konteks pemberdayaan berkontribusi pada penguatan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi celah penelitian serta merumuskan rekomendasi konseptual dan kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah, akademisi, dan pelaku sektor pariwisata dalam memberdayakan pemuda secara lebih strategis.

3.2 Kriteria Kelayakan (*Eligibility Criteria*)

Artikel yang digunakan dalam *scoping review* ini dipilih berdasarkan kriteria yang bertujuan untuk memetakan konsep-konsep utama yang menjadi dasar kajian, yaitu sumber utama dan jenis bukti yang tersedia, serta mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan konsep tersebut. Kriteria kelayakan dalam *scoping review* ini mencakup:

- a) Studi dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang membahas peran pemuda dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan menggunakan teori *empowerment*.
- b) Informasi mengenai partisipasi strategis pemuda dan faktor-faktor yang memengaruhinya menggunakan teori *empowerment*.
- c) Kajian yang mencakup metodologi, latar belakang, dan hasil terkait administrasi publik dalam konteks pariwisata menggunakan teori *empowerment*.
- d) Evaluasi terhadap bias dan kualitas studi terkait peran pemuda.

Tahapan dalam melaksanakan *scoping review* mengacu pada model Arksey dan O'Malley (Stenberg et al., 2018), yang meliputi:

1) Identifikasi Pertanyaan Penelitian

Tahap awal ini bertujuan menyusun pertanyaan penelitian sebagai dasar dalam pencarian dan seleksi literatur. Pertanyaan dirumuskan berdasarkan isu keterlibatan pemuda dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan dalam kerangka partisipasi publik dan administrasi publik. Rumusan masalah dalam *scoping review* ini antara lain: “Bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi pemuda dalam tata kelola pariwisata di Indonesia” dan “Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat keterlibatan pemuda dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan?”

2) Identifikasi Sumber Literatur yang Relevan

Scoping review ini menggunakan data sekunder dari berbagai literatur dan hasil penelitian terdahulu. Strategi pencarian dilakukan dengan menggunakan kerangka *SALSA* (*Search, Appraisal, Synthesis, and Analysis*), untuk memperjelas fokus topik “Peran Strategis Pemuda dalam Mendorong Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan.” Pencarian dilakukan melalui *database* seperti *Google Scholar* dan *Scopus*, dengan bantuan aplikasi *Harzing's Publish or Perish (PoP)* untuk mengakses berbagai jurnal dari sumber ilmiah seperti *Web of Science*, *Crossref*, dan *Microsoft Academic*.

3) Seleksi Sumber Literatur

Seleksi dilakukan terhadap hasil pencarian literatur dari *Google Scholar* dan *Scopus*. Literatur dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yakni publikasi yang relevan dengan topik partisipasi pemuda dalam pariwisata berkelanjutan, diterbitkan pada tahun 2019–2024, berbahasa Indonesia atau Inggris, memiliki pendekatan kualitatif, tersedia dalam bentuk *full text*, dan sesuai dengan rumusan masalah. Kriteria eksklusi meliputi literatur yang tidak membahas peran pemuda dalam konteks tata kelola pariwisata atau tidak relevan dengan perspektif administrasi publik.

4) Ekstraksi Data

Tahapan ini melibatkan penyusunan tabel data atau bagan berisi ringkasan karakteristik studi yang dipilih, seperti nama penulis, tahun publikasi, wilayah kajian, tujuan penelitian, metode yang digunakan, bentuk partisipasi pemuda, serta hasil utama. Proses ini dikenal juga sebagai *charting* atau *mapping*, bertujuan menyajikan informasi secara logis dan sistematis sesuai tujuan serta pertanyaan penelitian.

5) Menyusun, Merangkum, dan Melaporkan Hasil

Sintesis dilakukan secara deskriptif melalui analisis isi terhadap literatur yang terpilih. Proses ini mencakup penyusunan data studi yang relevan tentang partisipasi pemuda dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan, penyusunan ringkasan dalam bentuk tabel, dan pelaporan hasil analisis secara naratif berdasarkan pertanyaan penelitian.

6) Konsultasi dengan Pihak yang Kompeten

Tahap ini bersifat opsional dan dilakukan setelah hasil awal *scoping review* disusun. Konsultasi dilakukan dengan pakar atau praktisi di bidang pariwisata berkelanjutan maupun administrasi publik untuk memperoleh masukan terhadap literatur yang dipilih, proses sintesis, dan penulisan akhir. Dalam konteks *scoping review* ini, konsultasi dilakukan dengan pengelola komunitas pemuda pariwisata serta dosen pembimbing.

3.3 Identifikasi Sumber Literatur yang Relevan atau Sejenis

3.3.1 Sumber Literature

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Sumber data sekunder ini diperoleh dari artikel ilmiah bereputasi nasional maupun internasional, baik yang berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, yang memuat tema pemberdayaan pemuda dalam pengelolaan pariwisata atau yang relevan dengan penerapan teori *empowerment*, khususnya dalam konteks sosial dan pembangunan berkelanjutan. Proses pencarian literatur dilakukan melalui bantuan aplikasi *Harzing Publish or Perish (PoP)*, dengan fokus pencarian

pada *database Google Scholar* dan *Scopus*. Penggunaan *PoP* memungkinkan peneliti untuk mengakses dan menganalisis publikasi akademik dari berbagai sumber data besar, seperti *Google Scholar*, *Scopus*, *Web of Science*, *Microsoft Academic*, *Crossref*, dan *PubMed*, guna memperoleh hasil penelusuran yang komprehensif.

PoP sendiri merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat mengambil, menyusun, dan menganalisis kutipan akademik dari berbagai *database*, lalu menyajikannya dalam bentuk matriks kutipan. Di dalamnya terdapat informasi seperti jumlah kutipan, total halaman, serta indeks dari masing-masing artikel (Harzing, 2016). Melalui analisis ini, peneliti dapat menilai relevansi, kredibilitas, dan kontribusi dari literatur yang digunakan untuk mendukung pembahasan pemberdayaan pemuda dalam pengelolaan lingkungan.

3.3.2 Strategi Pencarian Literature

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review (SLR)* dengan pendekatan *SALSA (Search, Appraisal, Synthesis, and Analysis)*. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian mengenai peran strategis pemuda dalam mendorong tata kelola pariwisata berkelanjutan. Pendekatan *SALSA* dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan terstruktur mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu serta menemukan kesenjangan (*research gap*) yang dapat dijadikan dasar penyusunan strategi pemberdayaan pemuda dalam konteks pariwisata berkelanjutan.

Tahapan dalam metode *SALSA* meliputi:

a) *Search* (Pencarian)

Pada tahap ini dilakukan penelusuran literatur melalui berbagai basis data seperti *Google Scholar*, *Scopus*, dan *DOAJ* dengan menggunakan kata kunci “pemuda”, “partisipasi publik”, “pemberdayaan masyarakat”, dan “pariwisata berkelanjutan”. Rentang waktu publikasi yang digunakan dibatasi antara tahun 2020–2024 untuk menjamin relevansi

dan kebaruan sumber.

b) *Appraisal* (Penilaian)

Tahap ini melibatkan proses seleksi dan evaluasi terhadap literatur yang ditemukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi: (a) artikel berbahasa Indonesia atau Inggris; (b) relevan dengan tema partisipasi atau pemberdayaan pemuda dalam pariwisata; dan (c) dipublikasikan di jurnal ilmiah. Sementara kriteria eksklusi meliputi: (a) artikel non-akademik seperti berita atau opini; dan (b) artikel yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tata kelola pariwisata berkelanjutan.

c) *Synthesis* (Sintesis)

Pada tahap ini, literatur yang telah terpilih disintesis untuk menemukan pola, tema, serta keterkaitan antar-penelitian. Proses sintesis dilakukan dengan mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan tiga fokus utama: (1) bentuk dan tingkat partisipasi pemuda, (2) faktor pendukung dan penghambat, serta (3) strategi penguatan peran pemuda.

d) *Analysis* (Analisis)

Tahap terakhir adalah menganalisis hasil sintesis untuk menarik kesimpulan dan menghasilkan pemahaman baru mengenai pola partisipasi pemuda dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan. Analisis ini dilakukan secara tematik dengan menghubungkan hasil temuan dengan teori pemberdayaan Zimmerman serta konsep administrasi publik partisipatif.

Dengan menerapkan pendekatan *SALSA*, penelitian ini tidak hanya mengumpulkan informasi dari berbagai literatur, tetapi juga menghasilkan pemetaan tematik yang sistematis tentang bagaimana pemuda berperan, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat dikembangkan dalam memperkuat tata kelola pariwisata berkelanjutan.

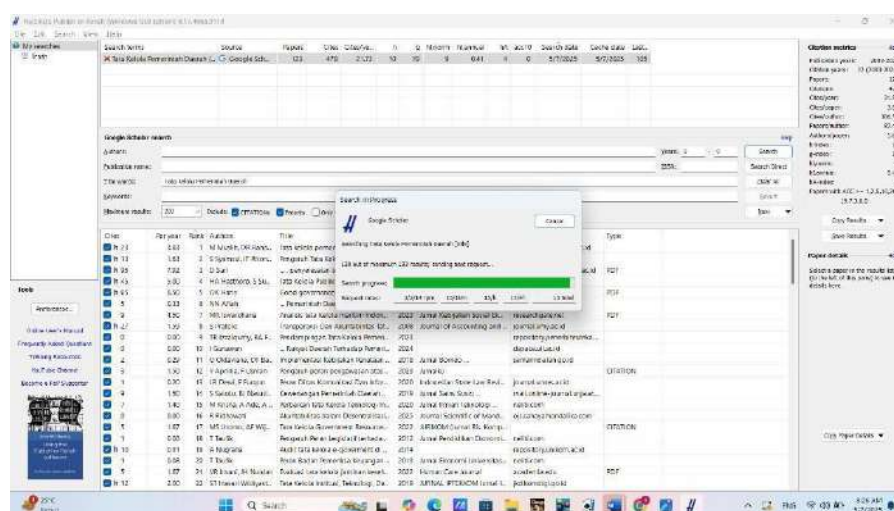
Tabel 1. Framework SALSA

Komponen	Penjabaran
Search	Mengidentifikasi literatur yang relevan dengan tema penelitian.
Appraisal	Menyeleksi dan mengevaluasi kualitas artikel yang diperoleh.
Synthesis	Mengelompokkan dan menyusun hasil temuan berdasarkan tema penelitian.
Analysis	Menarik kesimpulan konseptual dan praktis dari hasil sintesis.

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2025)

3.4 Seleksi Literature

Literatur dalam penelitian ini diperoleh melalui aplikasi *Harzing Publish or Perish* dengan menggunakan database *Google Scholar* dan *Scopus*. Pada pencarian *Google Scholar*, digunakan kata kunci “Pemuda *OR* Youth AND Administrasi Publik *OR* Public Administration AND Youth Empowerment AND Kebijakan AND Pariwisata Berkelanjutan AND Public Participation AND Sustainable Tourism AND Indonesia”. Sementara pencarian pada Penyesuaian kata kunci ini dilakukan agar relevan dengan struktur masing-masing *database* dan untuk memperoleh hasil pencarian yang optimal. Pencarian dilakukan untuk rentang tahun 2020 hingga 2024, dengan batas maksimum literatur yang ditelusuri sebanyak 1.000 artikel dari *Google Scholar* dan 1000 artikel dari *Scopus*.



(Sumber: Harzing Publish or Perish, 2025)

Gambar 2. Proses Pencarian Literatur Pada Aplikasi *Publish or Perish* (PoP)

Gambar tersebut menunjukkan tahapan pencarian literatur berdasarkan kata kunci, rentang tahun, sumber *database*, dan batas maksimum penelusuran literatur. Hasil pencarian ditampilkan dalam bentuk daftar artikel yang relevan, kemudian dilakukan proses skrining untuk menyaring literatur sesuai kriteria. Artikel yang relevan dianalisis mulai dari abstraknya hingga pembacaan secara menyeluruh. Pemilihan artikel dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan. Artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi akan dilanjutkan ke tahap *review*.

Tabel: 2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Aspek	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
<i>Search</i>	Tata kelola pariwisata berkelanjutan di Indonesia	Selain tata kelola pariwisata berkelanjutan di Indonesia
<i>Appraisal</i>	Peran strategis pemuda dalam tata kelola pariwisata	Selain peran pemuda dalam tata kelola pariwisata
<i>Comparison</i>	Tata kelola pariwisata berkelanjutan	Selain tata kelola pariwisata
<i>Synthesis</i>	Keterlibatan pemuda dan partisipasi publik dalam pariwisata berkelanjutan	Topik lain di luar keterlibatan pemuda dalam pariwisata
<i>Analysis</i>	Artikel orisinal, penelitian kualitatif, deskriptif, kebijakan publik	Book chapters, kuantitatif, atau tidak relevan
<i>Publication years</i>	2020–2024	Sebelum 2020
<i>Language</i>	Bahasa Indonesia dan Inggris	Bahasa lain

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2025)

PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta- Analyses*) merupakan panduan yang membantu peneliti melaporkan proses seleksi dan hasil dari tinjauan sistematis secara transparan dan menyeluruh. PRISMA *Flowchart* menyediakan informasi tentang jumlah artikel yang teridentifikasi dari hasil pencarian, jumlah artikel yang disaring, artikel yang memenuhi syarat, dan yang digunakan dalam kajian akhir. Tahapan ini penting untuk memastikan kualitas data

yang digunakan.

Tabel 3. PRISMA Flowchart – Ringkasan Seleksi Literatur

Tahapan Seleksi	Jumlah Artikel
Identifikasi artikel dari Google Scholar	474
Artikel setelah duplikasi dihapus	384
Artikel yang disaring berdasarkan abstrak dan judul	102
Artikel setelah duplikasi dihapus	200
Artikel yang disaring berdasarkan abstrak dan judul	95
Artikel yang dibaca secara full-text	30
Artikel yang dimasukkan ke dalam review akhir	69
Artikel yang dibaca secara full-text	39
Tahapan Seleksi	Jumlah Artikel
Identifikasi artikel dari Scopus	200

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2025)

3.5 Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan mengenai pemberdayaan pemuda dalam pengelolaan lingkungan hidup. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang bersumber dari hasil-hasil penelitian terdahulu terkait penerapan konsep *empowerment* (pemberdayaan) pemuda dalam isu-isu lingkungan hidup. Artikel-artikel ilmiah yang relevan diperoleh melalui penelusuran secara daring pada jurnal ilmiah nasional dan internasional, baik berbahasa Indonesia maupun Inggris. Peneliti secara mandiri melakukan proses skrining awal terhadap judul dan abstrak, dilanjutkan dengan penyaringan teks lengkap dari artikel yang teridentifikasi, guna memastikan relevansi dan kualitas

terhadap fokus penelitian. Artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dianalisis secara kritis menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitas metodologi penelitian dinilai dengan menggunakan *Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross-Sectional Studies*, dan *Critical Appraisal Checklist for Qualitative Research*.

Tabel 4. Komponen penilaian kualitas metodologi

Komponen yang Dinilai	Penjelasan
Tujuan penelitian jelas	Studi memiliki pertanyaan atau tujuan penelitian yang spesifik dan terukur.
Kriteria inklusi & eksklusi dijelaskan	Menjelaskan siapa yang dilibatkan dan dikecualikan dari penelitian.
Ukuran sampel memadai	Jumlah responden mencukupi untuk memberikan kesimpulan yang valid.
Variabel didefinisikan secara jelas	Semua variabel penting dijelaskan definisinya dan cara pengukurannya.
Metode analisis sesuai	Teknik analisis statistik yang digunakan tepat untuk tujuan penelitian.
Faktor perancu dikendalikan	Mengidentifikasi dan mengendalikan variabel luar yang memengaruhi hasil.
Hasil dilaporkan dengan tepat	Data hasil disajikan dengan jelas, lengkap, dan relevan dengan pertanyaan penelitian.

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2025)

Suatu studi dikategorikan sebagai berkualitas sedang apabila memenuhi 6 hingga 8 kriteria dari daftar penilaian, sedangkan studi yang memenuhi 9 hingga 10 kriteria dikategorikan sebagai penelitian dengan kualitas tinggi (Stenberg et al., 2018).

3.6 Sintesis

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pemuda dapat memainkan peran strategis dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan, dengan menempatkan mereka sebagai subjek aktif dalam partisipasi publik. Studi ini mengadopsi pendekatan sistematis melalui penelusuran literatur berbasis data sekunder menggunakan aplikasi *Harzing Publish or Perish* dari dua *database* utama: *Google Scholar* dan *Scopus*. Proses pencarian literatur dilakukan dengan rentang tahun 2019–2024 dan difokuskan pada artikel-artikel yang membahas keterlibatan publik, tata kelola pariwisata, dan partisipasi pemuda, dengan seleksi dilakukan berdasarkan pedoman PRISMA dan kerangka kriteria inklusi-eksklusi.

Pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Empowerment*, yang dipelopori oleh Zimmerman (2000), yang memandang pemberdayaan sebagai proses di mana individu, kelompok, atau komunitas mendapatkan kontrol atas hidup mereka dan mampu mempengaruhi keputusan yang memengaruhi mereka. Dalam konteks tata kelola pariwisata, pemuda diberdayakan tidak hanya sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai aktor transformasional yang dapat mendorong perubahan sosial melalui keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pariwisata.

Sintesis hasil literatur menunjukkan bahwa pemberdayaan pemuda memainkan peran penting dalam keberhasilan tata kelola pariwisata berkelanjutan. Terdapat tiga dimensi utama pemberdayaan yang teridentifikasi dari hasil analisis:

- a) Pemberdayaan Psikologis: Merujuk pada kepercayaan diri dan perasaan mampu dari pemuda untuk berkontribusi dalam isu-isu kebijakan pariwisata.
- b) Pemberdayaan Organisasional: Keterlibatan pemuda dalam organisasi kepemudaan atau komunitas lokal yang memungkinkan mereka untuk memiliki suara kolektif dan menyusun agenda advokasi.
- c) Pemberdayaan Komunitas: Kolaborasi antara pemuda dan pemangku kepentingan lain seperti pemerintah, LSM, dan pelaku usaha lokal dalam mewujudkan destinasi wisata yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, literatur menekankan bahwa prinsip-prinsip dalam teori *empowerment* seperti kontrol personal, pengaruh terhadap lingkungan sosial, dan kesadaran kritis, harus menjadi fondasi dalam proses pemberdayaan pemuda dalam isu lingkungan. Partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan—yang didasarkan pada akses terhadap informasi, penguatan kapasitas, dan peluang dalam pengambilan keputusan merupakan bentuk nyata dari pemberdayaan yang transformatif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemberdayaan pemuda melalui pendekatan partisipatif berbasis teori *empowerment* merupakan instrumen penting dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang tidak hanya responsif terhadap tantangan ekologis, tetapi juga inklusif secara sosial. Ke depan, upaya untuk memperkuat kapasitas, kesadaran kritis, serta peran aktif pemuda harus menjadi prioritas dalam kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup di tingkat komunitas..

3.7 Konsultasi

Tahapan konsultasi dalam metode *scoping review* bersifat tidak wajib, namun dapat memberikan nilai tambah terhadap validitas studi (Stenberg et al., 2018). Dalam penelitian ini, konsultasi dilakukan setelah hasil awal telah disusun dalam bentuk tabel sintesis dan visualisasi menggunakan diagram PRISMA. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam tahap ini adalah tokoh pemuda lokal yang aktif dalam kegiatan pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah tujuan wisata, serta dosen pembimbing. Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk memperoleh umpan balik terhadap hasil sementara penelitian, memperkaya perspektif partisipatif dari aktor pemuda, serta meningkatkan ketepatan dan relevansi temuan dalam konteks tata kelola pariwisata berbasis pemberdayaan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam peran strategis pemuda dalam mendorong tata kelola pariwisata berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif dalam perspektif administrasi publik. Dengan menggunakan metode scoping review terhadap berbagai literatur yang relevan, penelitian ini berhasil memetakan dinamika partisipasi pemuda, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta strategi pemberdayaan yang dapat memperkuat posisi pemuda sebagai agen pembangunan di sektor pariwisata. Kesimpulan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Bentuk dan Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Tata Kelola Pariwisata

Tingkat partisipasi dapat diukur melalui frekuensi keterlibatan, jenis kegiatan yang diikuti, dan dampak yang dihasilkan, yang menunjukkan bahwa pemuda di daerah memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya pariwisata. Bentuk partisipasi pemuda dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program wisata.

- a) Pada tahap perencanaan, partisipasi pemuda tercermin dalam keterlibatan mereka dalam forum musyawarah, penyusunan rencana pengembangan destinasi, serta inisiasi ide-ide kreatif berbasis potensi lokal. Namun, keterlibatan ini seringkali masih bersifat konsultatif atau simbolik, belum sepenuhnya bermakna (*meaningful participation*).
- b) Pada tahap pelaksanaan, pemuda berperan sebagai pelaksana kegiatan wisata seperti pengelola homestay, pemandu wisata lokal, pelaku ekonomi kreatif berbasis pariwisata, serta fasilitator edukasi budaya dan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa partisipasi pemuda berada dalam kategori instrumental dan kooperatif, di mana mereka berkontribusi secara langsung

pada operasionalisasi program

- c) Sementara itu, pada tahap evaluasi, keterlibatan pemuda masih terbatas, biasanya hanya pada pengisian survei atau partisipasi dalam forum evaluasi terbatas. Ini mencerminkan masih lemahnya sistem pelibatan pemuda dalam proses monitoring dan evaluasi kebijakan secara substansial. Tingkat partisipasi mereka umumnya belum mencapai level partisipasi kolaboratif atau *co-decision making*, sebagaimana diidealkan dalam teori partisipasi publik Arnstein (1969).

2) Faktor yang Mendukung dan Menghambat Keterlibatan Pemuda dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keterlibatan pemuda dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, baik yang mendukung maupun yang menghambat. Faktor pendukung meliputi dukungan kebijakan pemerintah, akses terhadap informasi, serta keberadaan organisasi pemuda yang aktif. Di sisi lain, faktor penghambat seperti kurangnya dukungan, hambatan budaya, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya dapat mengurangi motivasi pemuda untuk terlibat. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam tata kelola pariwisata. Keterlibatan pemuda dalam pengelolaan pariwisata tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor struktural maupun kultural. Faktor-faktor pendukung antara lain:

- a) Kebijakan afirmatif dari pemerintah yang membuka ruang partisipatif bagi generasi muda melalui program kepemudaan dan pemberdayaan wisata.
- b) Akses terhadap teknologi digital dan informasi, yang memungkinkan pemuda menggagas dan mempromosikan inovasi dalam pengelolaan destinasi.
- c) Aktivisme organisasi pemuda, baik di level desa maupun kota, yang menyediakan wadah artikulasi aspirasi dan kolaborasi dengan aktor-aktor lain.
- d) Kesadaran ekologis dan sosial yang tinggi di kalangan generasi muda, terutama yang didorong oleh pendidikan, komunitas, dan gerakan

lingkungan.

Di sisi lain, terdapat pula berbagai hambatan signifikan yang mengurangi kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda, seperti:

- a. Rendahnya pengakuan formal terhadap pemuda dalam struktur pengambilan kebijakan pariwisata di tingkat lokal.
- b. Stigma budaya yang masih menganggap pemuda kurang matang atau belum cukup kompeten untuk dilibatkan dalam keputusan strategis.
- c. Keterbatasan akses sumber daya, baik finansial, pelatihan, maupun dukungan kelembagaan, yang membatasi kapasitas pemuda untuk bertindak lebih luas.
- d. Minimnya koordinasi antar-aktor, khususnya antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas pemuda dalam membangun tata kelola kolaboratif.

Faktor-faktor ini menunjukkan pentingnya pendekatan pemberdayaan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural, guna mengatasi hambatan sistemik yang dihadapi pemuda dalam menjalankan perannya.

3) Strategi untuk Memperkuat Peran Pemuda melalui Pendekatan Partisipatif
Strategi pemberdayaan pemuda yang diusulkan dalam penelitian ini merujuk pada konsep empowerment dari Zimmerman (2000), yang mencakup tiga dimensi utama: intrapersonal, interaksional, dan behavioral empowerment.

- a) Intrapersonal empowerment menekankan pada penguatan kapasitas personal pemuda, termasuk peningkatan rasa percaya diri, efikasi diri, dan persepsi terhadap kontrol atas kehidupan sosial dan lingkungannya. Ini dapat dikembangkan melalui pendidikan kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan wisata, dan pengembangan soft skill.
- b) Interaksional empowerment mengacu pada kemampuan pemuda memahami dan menavigasi sistem sosial, politik, dan kelembagaan yang memengaruhi sektor pariwisata. Strategi yang diperlukan meliputi pembukaan ruang partisipatif di forum pengambilan keputusan, peningkatan akses terhadap jaringan kolaborasi (baik antar komunitas maupun dengan pemerintah), serta inklusi pemuda

dalam mekanisme kebijakan seperti Musrenbang.

- c) Behavioral empowerment berkaitan dengan tindakan nyata pemuda dalam menciptakan perubahan. Ini dapat diwujudkan melalui inisiatif komunitas berbasis wisata, proyek konservasi lingkungan, kampanye edukasi digital tentang pariwisata berkelanjutan, dan praktik wirausaha sosial yang berorientasi pada masyarakat lokal.

Strategi-strategi tersebut perlu didukung oleh pendekatan kebijakan publik yang responsif, inklusif, dan berbasis bukti. Pemerintah perlu mengintegrasikan program pemberdayaan pemuda dalam rencana pembangunan daerah, mengalokasikan dana afirmatif untuk inisiatif wisata berbasis komunitas, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan generasi muda secara langsung.

Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pemuda dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan bukanlah sebuah wacana normatif semata, melainkan kebutuhan strategis dalam konteks pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan antar-generasi. Pemuda bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga co- designer dan co-leader dalam menentukan arah pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Maka, komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas pemuda menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berdampak sosial dan ekologis secara positif dalam jangka panjang.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terkait hasil dan temuan *review*, yaitu sebagai berikut:

1) Saran Untuk Pemerintah

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran krusial dalam menciptakan ekosistem yang mendukung partisipasi pemuda dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- a) Rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan di daerah mencakup pengembangan program pendidikan dan pelatihan yang relevan, serta peningkatan dukungan kebijakan dari pemerintah. Program pelatihan harus dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemuda dalam manajemen pariwisata, sementara kebijakan yang inklusif perlu disusun untuk menyediakan dana, fasilitas, dan akses teknologi yang memadai. Selain itu, penguatan organisasi pemuda sebagai platform kolaborasi dan advokasi sangat penting untuk memaksimalkan partisipasi mereka. Pemanfaatan teknologi dan media sosial juga harus dioptimalkan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan keterlibatan pemuda dalam promosi dan pengembangan destinasi wisata.
- b) Selanjutnya, pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan harus diterapkan untuk melibatkan pemuda secara aktif di setiap tahap pengelolaan pariwisata. Meningkatkan kesadaran dan motivasi pemuda melalui kampanye informasi yang menekankan pentingnya peran mereka dalam tata kelola pariwisata dapat meningkatkan rasa percaya diri dan komitmen mereka. Selain itu, evaluasi berkala terhadap program pemberdayaan dan penyediaan akses yang lebih mudah ke sumber daya finansial dan informasi akan membantu mengatasi hambatan yang dihadapi pemuda.

2) Saran Untuk Penulis

- a) Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai penerapan prinsip *Empowerment* pada peran strategis dan tingkat partisipasi pemuda dalam mendorong tata kelola pariwisata di Indonesia dengan memfokuskan pada studi kasus di daerah yang memiliki keberhasilan tinggi dalam penerapannya, sehingga dapat menjadi acuan bagi daerah lain dalam upaya mengoptimalkan peran strategis pemuda melalui penerapan prinsip *Empowerment* dengan menyoroti faktor yang menjadi pendukung dan meminimalisir faktor yang menjadi penghambat.

- b) Peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai penerapan prinsip *Empowement* pada kebijakan peran partisipasi pemuda dalam tata kelola pariwisata di Indonesia dengan menggunakan metode yang berbeda, yaitu kuantitatif untuk mengukur dampak konkret dari penerapan kebijakan pengelolaan sampah. Sehingga dapat memberikan perspektif yang baru dan memperkaya literatur di bidang peran pemuda dan tata kelola pariwisata

DAFTAR PUSTAKA

- Adipta, M., Mamuki, E., & Tasrif, M. J. (2022). Eksistensi pemuda dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial dan Agama*, 8(2). 10.53565/pssa.v8i2.686
- Anisa, A., Ulfayanti, N., Nurvaika, N., & Aminah, S. (2022). Inovasi pemuda dalam mengembangkan ekonomi kreatif melalui produksi sirup markisa di Desa Pattongko. *Proceedings of the 3rd UMY Grace 2022*. <https://doi.org/10.18196/umygrace.v2i1.475>
- Anshory, A. (2002). *Penerapan aktivitas pengembangan wilayah*. Binarupa
- Ardiyansari, N., Saryani, & Muhamad. (2019). Peran organisasi pemuda dalam pengembangan ekowisata kawasan mangrove guna mewujudkan ketahanan lingkungan. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), 226–252. <https://doi.org/10.22146/jkn.46194>
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. PT Rineka Cipta.
- Awangku Hassanah, B. P. B. (2009). *Success of ecotourism sites and local community participation in Sabah* [Doctoral dissertation, Victoria University of Wellington].
- Bhatia, A. (2016). Youth participation in sustainable tourism development: A case study of India. *Journal of Tourism and Hospitality Management*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.15640/jthm.v4n1a1>
- Booth, A., Papaioannou, D., & Sutton, A. (2012). *Systematic approaches to a successful literature review*. SAGE.
- Buckley, R. (2012). Sustainable tourism: Research and reality. *Journal of Sustainable Tourism*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.610508>
- Cater, E., & Lowman, G. (2003). *Ecotourism: A sustainable option?* John Wiley

& Sons.

- Chawla, L. (2009). *Growing up in an urbanizing world*. UNEP.
- Cohen, E. (2004). *Contemporary tourism: Diversity and change*. Elsevier.
- Dyer, P., Gursoy, D., Sharma, B., & Carter, J. (2007). Structural modeling of resident perceptions of tourism. *Tourism Management*, 28(2), 429–440. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.03.002>
- Fennell, D. A. (2008). *Ecotourism: An introduction*. Routledge.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. BP Undip.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and self-identity*. Polity Press.
- Ginanjari, K. (1997). *Pemberdayaan masyarakat*. UGM.
- Gursoy, D., & Rutherford, D. G. (2004). Host attitude toward tourism. *Annals of Tourism Research*, 31(3), 495–516. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2003.12.006>
- Hunihua, R. I., & Suat, H. (2023). Strategi pengembangan pariwisata hijau: Urgensi regulasi dan sinergi multisektoral di Kota Ambon. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(1), 85–103. <https://doi.org/10.30598/vol18iss1pp85-103>
- Jamal, T., & Stronza, A. (2009). Collaboration theory and tourism research. *Annals of Tourism Research*, 36(2), 245–264. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2009.01.00>
- Junaid, I. (2019). Model sinergi unsur pentahelix pariwisata dalam pengelolaan destinasi wisata. *Sosiohumaniora*, 21(1), 22–33. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.17016>
- Khoo-Lattimore, C., Prayag, G., & Disegna, M. (2019). Cultural complexity, empowerment, and youth participation in tourism development. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(3), 336–352. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1425691>
- Kuswandi, A., Rasyid, M. H. A., Nuraini, S., & Sa'diyyah, Z. N. (2025). Pendekatan pentahelix dalam tata kelola desa wisata berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(2), 324–343. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5290>

- Maulana, S. (2024). Model kolaboratif dalam meningkatkan kunjungan wisatawan pasca pandemi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 24–36. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13684094>
- Mardiyantoro, C., Herlina, H., & Mulyeni, S. (2023). Strategi pengembangan SDM dan ekonomi kreatif dalam peningkatan pariwisata. *Jurnal Soshum Insentif*, 6(1), 62–74. <https://doi.org/10.36787/jsi.v6i1.1201>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis* (3rd ed.). SAGE.
- Moscardo, G. (2008). Building community capacity for tourism development. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(2), 1–20. <https://doi.org/10.2167/jost753.0>
- Mu'is, A. (2023). Strategi city branding “Republik Kopi” Bondowoso. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18(2), 159–170. <https://doi.org/10.47441/jkp.v18i2.329>
- Nugraha, R., Azkar, N., & Taufik. (2023). Pengembangan sektor ekonomi pariwisata. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 5(2), 115–123. <https://doi.org/10.20527/jpp.v5i2.11431>
- Putra, G. S. P. (n.d.). *Partisipasi pemuda dalam pengembangan agrowisata di Desa Berjo* [Skripsi, Universitas Sebelas Maret].
- Richards, G., & Wilson, J. (2003). Youth travel and backpacking. *Annals of Tourism Research*, 30(1), 30–49. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(02\)00072-1](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(02)00072-1)
- Rosshad, A., Saribulan, N., & Primasari, V. V. K. D. (2024). Jaringan aktor dalam tata kelola kolaborasi industri pariwisata. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(3), 623–635. <https://doi.org/10.23887/jish.v13i3.83716>
- Santika, M., Fadillah, M. R., Damayanti, S., & Farhan, M. (2025). Peran pemuda lokal dalam pengembangan ekonomi desa wisata. *PESHUM*, 4(4), 6711–6720. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9701>
- Scheyvens, R. (2002). *Tourism for development: Empowering communities*. Pearson.
- Sharpley, R. (2009). Tourism development and the environment. *Journal of Sustainable Tourism*, 17(3), 1–15.

<https://doi.org/10.1080/09669580903035466>

Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Tosun, C. (2000). Limits to community participation. *Tourism Management*, 21(6), 613–633. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(00\)00009-1](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00009-1)

UNWTO. (2017). *Youth and tourism: A global perspective*.

UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Weaver, D. B. (2006). *Sustainable tourism: Theory and practice*. Elsevier.

Wight, P. A. (1994). Community involvement in tourism development. *Annals of Tourism Research*, 21(1), 1–20. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(94\)90097-3](https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)90097-3)

Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory. In *Handbook of community psychology*. Springer.